

SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN INSTRUKSI PRESIDEN
NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI PENGELOLAAN APBN
PADA BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN**

Oleh:

Vlenka Moistisa Adas

NIM: 21043103



KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN

TAHUN 2025

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN INSTRUKSI PRESIDEN
NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI PENGELOLAAN APBN
PADA BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN**

Oleh:

Vlenka Moistisa Adas

NIM: 21043103



**KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul

**ANALISIS PENERAPAN INTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 2025
TENTANG EFISIENSI PENGELOLAAN APBN PADA BALAI TAMAN
NASIONAL BUNAKEN**

Oleh

Nama : Vlenka Moistisa Adas

NIM : 21043103

Program Studi : Akuntansi Keuangan

Disetujui untuk di ajukan

Manado, 18 Juli 2025

Pembimbing 1



Susy A. Marentek S.E.,M.SA
NIP. 19631230 198903 2 001

Pembimbing 2



Christony Maradesa S.E.,M.SA
NIP. 19880511 201903 1 013

Mengetahui,

Koordinator Program Studi
Akuntansi Keuangan



Prof. Dr. Hedy Rumambi,SE.,MM.,Ak.,CA.,CSRS

NIP. 19700205 199802 2 002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1
TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI PENGELOLAAN APBN PADA BALAI
TAMAN NASIONAL BUNAKEN**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Tim Penguji Akhir

Pada hari Rabu, 23 Juli 2025 pukul 12.00 – 14.00 di Jurusan Akuntansi.

Oleh

Nama : Vlenka Moistisa Adas
NIM : 21043103

Dan yang bersangkutan dinyatakan

LULUS

	Tim Penguji Akhir	
Ketua Sidang Penguji	: Stevie Kaligis, S.E.,MM.,Ak NIP.197204152002121000	(.....)
Penguji 1	: Raykes H. Tuerah, S.E.,MSA NIP.198603272019031014	(.....)
Penguji 2	: Drs. Johannes K. Santie, M.AP NIP.196207151990111001	(.....)

Mengetahui
JURUSAN AKUNTANSI
Koordinator Program Studi Akuntansi Keuangan

Prof. Dr. Hedy Rumambi,SE.,MM.,Ak.,CA.,CSRS

NIP. 19700205 199802 2 002



Ketua Jurusan

Raymond F. Rombot, SE.,MSi

NIP. 197402142003121002

Sekretaris Jurusan

Joseph N. Tangon, SE.,MSA

NIP. 197609042005011001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinal, merupakan hasil karya saya sendiri, Tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado, Bulan Tahun



Vlenka Moistisa Adas

NIM. 21043103

ABSTRAK

Vlenka Moistisa Adas, 2025. **Analisis Efektifitas Penerapan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Pengelolaan APBN Pada Balai Taman Nasional Bunaken**. Skripsi, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado. Dibimbing Oleh Pembimbing I: Susy A. Maretek, S.E.,M.SA dan Pembimbing II: Christony Maradesa, S.E.,M.SA.

Penelitian ini menganalisis implementasi Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Balai Taman Nasional Bunaken (BTNB). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi yang diterapkan oleh BTNB dalam menanggapi instruksi tersebut dan dampaknya terhadap optimalisasi APBN, efektivitas program konservasi, serta peningkatan akuntabilitas lembaga.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menganalisis data riil efisiensi yang terjadi pada setiap program BTNB. Strategi efisiensi yang diimplementasikan mencakup rasionalisasi program dengan penghapusan kegiatan non-esensial, penajaman fokus pada kegiatan inti, dan optimalisasi biaya operasional dan administratif tanpa mengorbankan target keluaran utama. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi efisiensi ini meliputi penghapusan kegiatan yang tidak berdampak langsung pada kinerja inti (misalnya, sosialisasi dan promosi pariwisata), peningkatan fokus dan realokasi anggaran ke program prioritas tinggi (misalnya, penyelamatan spesies), optimalisasi metode kerja dan pemanfaatan sumber daya lokal, serta penekanan biaya operasional dan administrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BTNB berhasil menerapkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dengan menunjukkan efisiensi yang signifikan dan terukur di seluruh programnya. Dampak positif dari efisiensi ini terlihat dari optimalisasi APBN melalui penghematan dana yang substansial, terjaganya atau bahkan meningkatnya efektivitas program konservasi karena penajaman fokus pada keluaran inti meskipun dengan anggaran yang lebih rendah, dan peningkatan akuntabilitas lembaga melalui transparansi data anggaran serta realisasi yang lebih ketat.

Kata Kunci: Efisiensi Anggaran, Pengelolaan APBN, Balai Taman Nasional Bunaken, Konservasi.

ABSTRAC

Vlenka Moistisa Adas, 2025. ***Analysis of the implementation efeectifty of presidential instruction number 1 of 2025 concerning the efficiency of APBN management at the Bunaken National Park Center.*** Thesis of applied bachelor of financial accounting majoring in accounting supervised by supervisor I: Susy A. Marentek, S.E., M.SA and supervisor II: Christony Maradesa, S.E., M.SA

This study analyzes the implementation of Presidential Instruction No. 1 of 2025 regarding the efficiency of the management of the State Budget (APBN) at the Bunaken National Park Office (BTNB). The purpose of this study is to identify the strategies implemented by BTNB in response to the instruction and its impact on the optimization of the state budget, the effectiveness of conservation programs, and the improvement of institutional accountability.

This research uses a descriptive qualitative method, by analyzing real data on the efficiency of each BTNB program. The efficiency strategies implemented include program rationalization by eliminating non-essential activities, sharpening focus on core activities, and optimizing operational and administrative costs without compromising key output targets. Key factors influencing these efficiencies include the elimination of activities that do not have a direct impact on core performance (e.g., tourism socialization and promotion), increased focus and reallocation of budgets to high-priority programs (e.g., species rescue), optimization of work methods and utilization of local resources, as well as the use of local resources and minimizing operational and administrative costs.

The results show that BTNB has successfully implemented Presidential Instruction No. 1 Year 2025 by demonstrating significant and measurable efficiency across its programs. The positive impact of this efficiency can be seen in the optimization of the state budget through substantial savings, maintained or even increased effectiveness of conservation programs due to a sharpened focus on core outputs despite lower budgets, and increased institutional accountability through stricter transparency of budget data and realization.

Keywords: Budget Efficiency, State Budget Management, Bunaken National Park, Conservation

RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI:

Nama	: Vlenka Moistisa Adas
Tempat, Tanggal Lahir	: Palu, 10 Desember 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Kristen Protestan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Desa Tiwoho Jaga II, Kec. Wori, Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara
Nama Orang Tua	
Nama Ayah	: Untung Sudirman Adas
Nama Ibu	: Hilda Karsin Mello

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK	:TK KHATOLIK SANTA MARIA GORETI PALU
SD	: SD NEGERI 9 PALU
SMP	: SMP NEGERI 2 PALU
SMA	: SMA NEGERI 2 PALU
Perguruan Tinggi	: POLITEKNIK NEGERI MANADO

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.”

(Matius 6:33)

Ayat ini mengingatkan penulis untuk selalu mendahulukan Tuhan dalam segala hal maka semuanya akan di berikan kepada penulis sesuai dan seturut kehendak-Nya.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan yang penuh kasih dan selalu memberikan hikmat dari awal perkuliahan sampai pada masa penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, tanpa kasih-Nya penulis bukanlah apa-apa.
2. Cinta pertama penulis, papa Untung Sudirman Adas yang tercinta yang sudah selalu berjuang dalam segala hal untuk kelancaran dalam studi penulis, terima kasih sudah menjadi orang tua yang tidak pernah mengeluh dan selalu mengusahakan kebahagiaan anak-anakmu, semoga pundakmu kuat selalu dan kiranya kekuatan dan kesehatan dilimpahkan padamu agar dapat melihat anak-anakmu sukses.
3. Belahan jiwa penulis, mama Hilda Karsin Mello yang terkasih, anugerah terindah yang pernah Tuhan berikan kepada penulis, kiranya pundakmu kuat selalu bahkan apapun yang di harapkan semoga menjadi kenyataan dan terima kasih sudah menjadi orang tua penulis yang terhebat yang tak pernah mengeluh atas segala hal dan menjadi orang nomor 1 yang selalu *support* penulis dari awal masa perkuliahan bahkan sampai pada tahap penulisan skripsi ini.
4. Kakak satu-satunya, Evelyn Auriel Adas yang selalu mendengar setiap keluh kesah penulis sebagai adik dan selalu memberikan saran dan motivasi bagi penulis untuk tetap kuat bertahan, kiranya kasih kita tak pernah putus dan selalu dalam lindungan Tuhan.
5. Opa Ventje Mello dan Oma Roos Rahasia, penulis sebagai cucu yang banyak merepotkan tetapi kalian tetap mengasihi penulis dan mendukung apa saja untuk keputusan yang penulis ambil. Dan juga kepada Opa Adas Arifin (Alm) dan Oma Rehan Lihu (Almh) yang sudah berada di surga bersama Tuhan yang terkasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada kalian, maafkan jika selama ini penulis belum sempat menunjukkan hal yang terbaik tetapi penulis harap kalian melihatnya dari atas sana.
6. Dosen Pembimbing 1, Ibu Susy Amelia Marentek, S.E.,M.SA yang sudah membimbing penulis dengan penuh sabar dan kasih layaknya seorang ibu yang ingin anaknya bisa sukses di jalan yang benar, kiranya kekuatan dan kasih dari

Tuhan selalu di limpahkan kepada dosen pembimbing 1 penulis yang terhormat dan yang paling penulis hormai.

7. Dosen Pembimbing 2, Bapak Christony Maradesa, S.E.,M.SA, yang sudah sabar menghadapi penulis dalam proses pembimbing, terima kasih sudah membimbing penulis dalam penulisan layaknya seorang ayah pada penulis kiranya kesehatan, hikmat, dan berkat di tambahkan kepada bapak.
8. Pimpinan Balai Taman Nasional Bunaken, Bapak Faat Rudhianto, S.Hut.,M.Si yang sudah menerima penulis untuk magang dan melakukan proses penelitian di tempat yang bapak pimpin dan sudah merangkul penulis layaknya bagian dari Balai Taman Nasional Bunaken.
9. Kasubag Tata Usaha Balai Taman Nasional Bunaken, Ibu Kusmayanti, S.Hut.,M.Si yang sudah membimbing penulis dalam masa magang bahkan membantu penulis dalam mendapatkan data untuk penelitian penulis dan menjadikan penulis sebagai anak yang selalu dirangkul dalam hal apapun. Terima kasih untuk segala sabar dan kasih sayang dan selalu memberi ruang penulis untuk mencoba hal baru.
10. Staf-staf Balai Taman Nasional Bunaken, Ka deka,ibu Seny, ka leo, ka julio, ka melky, ka pandu, ka boy, ka adi, ka jais, ka lian, dan ka rony yang sudah membimbing penulis dan menerima penulis dengan sukacita bahkan menganggap penulis sebagai adik yang ada di BTNB.
11. Sahabat penulis, Jeyni Johana Patrisia Saladi dan Felicita Yecita Alexander yang juga sedang berjuang dalam mendapatkan gelar,terima kasih telah menjadi orang yang selalu berada di dalam suka dan duka kehidupan penulis, kiranya pertemanan ini bisa sampai maut yang memisahkan
12. Teman seperjuangan penulis, Prima Chiangli Sarapil, Christin Mado, Windy Kiding Allo, dan Meylani Wondal yang selalu bersama dari awal masa perkuliahan hingga sekarang dalam masa penulisan skripsi dan juga sedang berjuang untuk mendapatkan gelar S.Tr.Ak kiranya setiap proses dan langkah yang di ambil di berikan kelancaran. Dan juga kepada Jellyana Kures, Carmen Awalo, dan Jenifer Saselah yang sudah berjuang dari awal perkuliahan dan harus berhenti dipertengahan jalan kiranya ada jalan lain yang di berikan Tuhan yang lebih indah dari sebelumnya.
13. Teman seangkatan akuntansi 2021 khususnya pada kelas D, kiranya kita semua bisa lulus di waktu yang tepat.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur di Panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa karena kebaikan serta Penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul ***“Analisis Efektivitas Penerapan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 Tentang efisiensi pengelolaan APBN pada Balai Taman Nasional Bunaken”***.

Penulis berkerinduan menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Dra. Maryke Alelo, MBA selaku Direktur Politeknik Negeri Manado.
2. Dr. Diane Tangian, SH., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Akademik.
3. Selvy Kalele, SE.,MSi selaku wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Rudolf Estephanus Golioth Mait, ST., MT selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
5. Juliet P.T. Makinggung, SE., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
6. Raymond Festus Rombot, S.E.,M.SI selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
7. Joseph Nugraha Tangon, S.E.,M.SA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
8. Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE., Ak., MM, CA., CSRS selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan.
9. Alpindos Toweula, SE.,MM.,Ak.,CA., BKP selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan.
10. Merry Ligia Sael, SE.,M.Si selaku Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi.
11. Johanes H. Tene, SE.,MSA.,AK.,CA., BKP selaku Kepala Laboratorium Akuntansi Keuangan.
12. Esrie A. N. Limpeleh, SE.,MM selaku Kepala Laboratorium Aplikasi Pengolahan Data.
13. Jacqueline G. Wenas, SE.,MSA selaku Kepala Labaratorium Sistem Informasi Akuntansi.
14. Dr. Ivonne H. Putong, SE.,AK.,M.,Ak CA selaku Kepala Laboratorium Pajak.
15. Antonius A. Tandi, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Kepala TUK Akuntansi.
16. Dra. Revleen M. Kaparang, M.Pd selaku Ketua Panitia Magang.

17. Susy Amelia Marentek, S.E., M.SA selaku dosen pembimbing 1 dan juga sebagai ketua panitia skripsi
18. Christony Maradesa, S.E., M.SA selaku dosen pembimbing 2
19. Stevie Kaligis, S.E.,MM.,Ak sebagai Ketua Penguji, Raykes H. Tuerah, S.E.,M.SA sebagai penguji 1, dan Drs. Johannes K. Santie, M.AP sebagai dosen penguji 2.
20. Selvie Joice Nangoy, S.E., Msi selaku dosen wali
21. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Jurusan Akuntansi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi terciptanya skripsi yang baik. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih.

Manado, Bulan Tahun

Vlenka Moistisa Adas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
ABSTRAK	v
ABSTRAC	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Bagi Penulis	5
1.4.2 Bagi Instansi	5
1.4.3 Bagi Institusi	5
1.5 Batasan Masalah.....	6
BAB II.....	7
LANDASAN TEORI	7
2.1 Konsep Efisiensi.....	7
2.1.1 Efisiensi Anggaran.....	7
2.1.2 Efisiensi Alokatif	8
2.1.3 Teori Efisiensi Teknis.....	8
2.1.5 Tujuan Efisiensi	9

2.2	Konsep Akuntansi Pemerintah	9
2.2.1	Akuntansi Pemerintah	9
2.2.2	Tujuan Akuntansi Pemerintah	10
2.3	Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Konservasi.....	11
2.3.1	Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan	11
2.3.2	Pengelolaan Keuangan Sektor Lingkungan.....	12
2.4	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025.....	13
2.5	Penelitian Terdahulu	14
2.6	Kerangka Berpikir.....	17
BAB III	19	
METODE PENELITIAN.....	19	
3.1	Jenis Penelitian	19
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	20
3.3	Sumber Data	20
3.3.1	Data Primer	20
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.4.1	Observasi	21
3.4.2	Wawancara	22
3.4.3	Dokumentasi	22
3.5	Teknik Analisis Data	22
3.5.1	Pengumpulan Data	22
3.5.2	Analisis isi	22
3.5.3	Analisis Dampak	23
3.5.4	Kesimpulan	23
BAB IV.....	24	
HASIL PENELITIAN.....	24	
4.1	Gambaran Umum.....	24
4.1.1	Sejarah Balai Taman Nasional Bunaken.....	24
4.1.2	Struktur organisasi	26
4.2	Hasil Penelitian	28
4.2.1	Analisis Efisiensi	31
4.2.2	Laporan Realisasi Anggaran	37

4.3	Pembahasan	41
4.3.1	Penerapan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 di BTNB	42
4.3.2	Dampak Efisiensi pada Optimalisasi APBN, Efektivitas Program Konservasi, dan Peningkatan Akuntabilitas.....	45
BAB V		47
	Kesimpulan dan Rekomendasi	47
5.1	Kesimpulan	47
5.2	Rekomendasi	47
DAFTAR PUSTAKA		49
LAMPIRAN		52

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu.....</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 4.2.1-1 Analisis efisiensi sebelum dan sesudah penerapan Inpres No. 1 Tahun 2025</i>	<i>33</i>
<i>Tabel 4.2.2-1 Analisis LRA.....</i>	<i>38</i>

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 2.6 Kerangka berfikir.....</i>	<i>19</i>
<i>Gambar 4.2-1 Data RKA-KL dan DIPA bulan Januari 2025</i>	<i>29</i>
<i>Gambar 4.2-2 Data RKA-KL dan DIPA bulan Februari 2025</i>	<i>29</i>
<i>Gambar 4.2-3 Data RKA-KL dan DIPA bulan Maret 2025</i>	<i>30</i>
<i>Gambar 4.2-4 Data RKA-KL dan DIPA bulan April 2025</i>	<i>31</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan negara adalah bagian penting dari jalannya pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Keuangan negara merupakan bidang yang mempelajari tentang pengelolaan dan pengaturan aspek keuangan yang terkait dengan pemerintahan suatu Negara. Semua proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban anggaran negara bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan membiayai kegiatan pemerinyah, pembangunan, serta penyediaan barang dan jasa publik.

Agar pengelolaan keuangan negara berjalan baik, prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas harus selalu diterapkan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara tertib, hemat, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Untuk memperkuat pengelolaan keuangan, pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). UU ini menekankan pentingnya kerjasama yang seimbang antara pusat dan daerah dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, ada juga UU Nomor 62 Tahun 2024 yang memperkuat tata kelola keuangan negara dengan mendorong penggunaan anggaran yang efisien, serta pengawasan yang lebih ketat agar dana yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara, Pemerintah Indonesia terus mengembangkan berbagai kebijakan dan instruksi yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Pada tahun 2025, Pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan yang penting terkait pengelolaan anggaran negara melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi

Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Tujuan utama Inpres ini adalah untuk mencegah pemborosan anggaran dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan dana negara. Melalui efisiensi pemerintah dapat mengefektifkan program-program prioritas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, memanfaatkan teknologi dan SDM, serta memperkuat kerja instansi pemerintah agar lebih produktif dan adaptif. Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta untuk meninjau dan mengevaluasi pengeluaran mereka, agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan efisien. Instruksi Presiden ini juga berlaku di sektor lingkungan, seperti pengelolaan sumber daya alam. Salah satunya di Balai Taman Nasional Bunaken, yang merupakan kawasan konservasi laut di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kawasan ini membutuhkan anggaran yang besar, baik untuk menjaga kelestarian lingkungan, memperbaiki fasilitas wisata, hingga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Pengelolaan kawasan konservasi seperti Taman Nasional Bunaken memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, tetapi juga dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui sektor pariwisata alam. Namun, pelaksanaan fungsi ini memerlukan dukungan anggaran yang besar, konsisten, dan dikelola secara efektif. Taman Nasional Bunaken, yang mencakup wilayah daratan dan perairan laut dengan ekosistem yang sangat kompleks dan sensitif, membutuhkan anggaran tahunan yang diperkirakan berkisar antara Rp3 miliar hingga Rp5 miliar. Sayangnya, pendapatan dari sektor wisata, yang salah satunya diperoleh dari tiket masuk, masih jauh dari mencukupi, yaitu hanya sekitar Rp1,3 miliar per tahun. Kesenjangan ini menandakan adanya persoalan struktural dalam hal pembiayaan, yang jika tidak ditangani dengan serius dapat berdampak langsung terhadap keberlanjutan kawasan.

Meskipun Balai Taman Nasional Bunaken telah menunjukkan kinerja yang baik dan bahkan memperoleh penghargaan sebagai pengelola anggaran terbaik di Sulawesi Utara pada tahun 2022, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pencapaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dalam arti yang sesungguhnya. Tantangan-

tantangan fundamental masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam manajemen anggaran berbasis kinerja, lemahnya sistem pengawasan dan pelaporan keuangan, serta kesulitan dalam menyusun prioritas alokasi dana untuk berbagai program yang memiliki urgensi dan dampak berbeda. Terlebih lagi, koordinasi antarinstansi, baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antarunit teknis di daerah), belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran yang efektif dan berorientasi hasil.

Dalam konteks tantangan tersebut, keberadaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah menjadi sangat krusial. Inpres ini tidak sekadar menjadi arahan administratif, tetapi merupakan sebuah langkah strategis untuk mereformasi sistem pengelolaan anggaran di seluruh satuan kerja pemerintah, termasuk pada sektor lingkungan dan konservasi alam. Inpres ini menuntut adanya perubahan paradigma dari sekadar penggunaan anggaran secara prosedural menjadi penggunaan anggaran yang berbasis pada hasil, dampak, dan kinerja nyata. Dalam hal ini, Balai Taman Nasional Bunaken dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan baru ini, baik dari aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan program, pelaporan kinerja, hingga monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Urgensi penerapan Inpres No. 1 Tahun 2025 di Taman Nasional Bunaken menjadi semakin tinggi jika mempertimbangkan kompleksitas permasalahan lingkungan yang dihadapi. Kawasan ini tidak hanya menghadapi tekanan dari aktivitas pariwisata dan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga rentan terhadap dampak perubahan iklim, pencemaran laut, dan konflik kepentingan antara pelestarian dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, anggaran yang dikelola harus benar-benar digunakan secara tepat sasaran dan berorientasi pada pencapaian tujuan strategis jangka panjang. Efisiensi di sini tidak berarti penghematan yang membabi buta, melainkan optimalisasi sumber daya untuk mencapai dampak terbesar terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya Inpres ini, diharapkan terjadi perubahan menyeluruh dalam cara kerja lembaga seperti Balai Taman Nasional Bunaken, yang mencakup peningkatan kapasitas SDM, integrasi perencanaan lintas sektor, serta penguatan sistem akuntabilitas publik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai bagaimana Inpres No. 1 Tahun 2025 dapat diterapkan secara kontekstual di Taman Nasional Bunaken. Kajian ini akan membantu mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam proses implementasi, merumuskan strategi adaptasi kebijakan di tingkat lokal, serta memastikan bahwa anggaran yang terbatas dapat menghasilkan dampak yang maksimal bagi konservasi dan pengembangan wisata berkelanjutan. Dengan kata lain, kajian ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa instruksi presiden benar-benar mampu menjawab tantangan nyata di lapangan, bukan sekadar menjadi dokumen normatif tanpa implementasi yang konkret.

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya akan di uraikan dalam laporan proposal skripsi yang berjudul: “ **ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI PENGELOLAAN APBN PADA BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN**”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang akan peneliti bahas sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas penerapan kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025
2. Bagaimana strategi Balai Taman Nasional Bunaken dalam menyesuaikan pengelolaan anggarannya untuk mendukung prinsip efisiensi dan efektivitas sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian Ini bertujuan mengetahui bagaimana efektivitas penerapan kebijakan efisiensi pengelolaan anggaran dan mengetahui Bagaimana strategi Balai Taman Nasional Bunaken dalam menyesuaikan pengelolaan anggarannya

untuk mendukung prinsip efisiensi dan efektivitas sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Penulis

- Penulis akan peroleh wawasan lebih dalam mengenai efisiensi pengelolaan APBN, yang menghubungkan teori dengan praktik di lapangan.
- Hasil Penelitian Ini Juga bisa menjadi referensi bagi peneliti lain untuk dapat memahami dan mengetahui dampak apa saja yang terjadi beserta dengan penanganannya.
- Penulis juga dapat berinteraksi secara langsung dengan beberapa pihak yang ada yang nantinya dapat membuka peluang bagi penulis untuk mendapatkan pekerjaan atau bahkan menjadi mitra kerja di masa yang akan datang

1.4.2 Bagi Instansi

Melalui penelitian ini juga, Balai Taman Nasional Bunaken dapat memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, Pengelolaan anggaran yang efisien akan memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan dengan **bijak** dan **terarah** untuk kegiatan pelestarian alam yang optimal.

1.4.3 Bagi Institusi

Hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi institusi khususnya jurusan Akuntansi sebagai bahan ajar atau studi kasus yang berguna bagi mahasiswa untuk mendapat banyak Materi bahkan referensi dan dapat memberikan contoh yang nyata bagi mahasiswa. Jugadapat membukan peluang untuk penelitian kolaboratif atau memberikan kesempatan magang bagi mahasiswa di instansi pemerintah.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian membahas pada analisis efektifitas terhadap data anggaran yang mengalami efisiensi akibat penerapan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 pada Balai Taman Nasional Bunaken. Data yang dianalisis meliputi program-program yang menunjukkan perubahan yang signifikan dalam RKA-KL dan DIPA pada bulan Januari 2025 sampai Februari 2025 (sebelum penerapan Inpres) dan RKA-KL dan DIPA pada bulan Maret 2025 hingga April 2025 (setelah penerapan Inpres). Fokus utama penelitian adalah pada program yang terdampak langsung oleh kebijakan efisiensi yang terbukti melalui selisih anggaran dan realisasi sebelum penerapan Inpres dengan anggaran dan realisasi setelah penerapan Inpres.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Efisiensi

2.1.1 Efisiensi Anggaran

Efisiensi merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan anggaran negara yang menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara optimal. Dalam buku *"Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi"*, efisiensi adalah ukuran seberapa baik suatu organisasi sektor publik memanfaatkan input (sumber daya) untuk menghasilkan output atau layanan publik. Suatu proses dikatakan efisien apabila mampu mencapai hasil maksimal dengan pengorbanan seminimal mungkin (Mardiasmo, 2022). Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, efisiensi berarti anggaran harus digunakan tanpa pemborosan, dengan prosedur yang sederhana, dan memberikan dampak nyata terhadap masyarakat. Hal ini sangat relevan dengan semangat yang diusung dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelaksanaan belanja APBN dan APBD. Dengan merujuk pada pemikiran Mardiasmo, penerapan instruksi tersebut seharusnya mendorong lembaga untuk mengelola anggaran secara lebih hemat, terarah, dan berorientasi pada hasil nyata, khususnya dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Efisiensi juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan agar pemerintah dapat mengelola anggaran dengan baik dan dapat memberikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal pada masyarakat. Dimana pengelolaan anggaran yang efisien berarti setiap biaya yang digunakan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Sebagian besar pemerintah masih menggunakan pendekatan *incremental* yaitu perencanaan anggaran yang hanya bertepatan tahun sebelumnya. Oleh karenanya, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas. Berkenaan dengan itu, maka penetapan standar kinerja proyek dan kegiatan serta harga satuannya, akan merupakan factor penentu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran (Kota & Suryati, 2024).

2.1.2 Efisiensi Alokatif

Efisiensi alokatif merupakan konsep yang menekankan pentingnya menggunakan sumber daya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Yang pada intinya sumber daya seperti anggaran, tenaga, bahkan waktu perlu dialokasikan ke tempat yang paling membutuhkan dan dapat memberikan manfaat terbesar. Dalam pelaksanaannya, efisiensi alokatif terjadi ketika tidak ada cara lain untuk mendistribusikan sumber daya yang bisa meningkatkan manfaat bagi satu pihak tanpa merugikan pihak lain. Beberapa penelitian seperti studi tentang efisiensi alokatif dalam pertanian cabai merah di garut, dimana menunjukan untuk mengoptimalkan penggunaan faktor produksi maka penggunaan seperti tenaga kerja dan benih perlu di tambah sedangkan hal seperti pupuk kimia yang tidak terlalu memberikan terhadap produksi cabai perlu di kurangi(Sonia et al., 2020).

Efisiensi alokatif memastikan agar anggaran dan sumber daya lainnya dapat digunakan untuk program yang paling penting yang di mana dapat membawa dampak besar tidak hanya bagi Lembaga kementerian tetapi juga bagi masyarakat. Misalnya dana yang akan di alokasikan digunakan untuk menjaga ekosistem laut dan mendukung masyarakat yang dimana hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melestarikan lingkungan.

2.1.3 Teori Efisiensi Teknis

efisiensi teknis menjelaskan keberhasilan perusahaan dalam memanfaatkan input yang dimiliki untuk memaksimalkan output yang dihasilkan efisiensi teknis dapat dilihat dari bagaimana sumber daya yang ada digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan konservasi dan pengelolaan.

Beberapa penelitian dalam penerapannya efisiensi teknik yaitu pendidikan konservasi berbasis teknologi dimana di Pulau Nain yang termasuk dalam kawasan taman nasional bunaken, masyarakat menghadapi keterbatasan akses listrik yang hanya tersedia dari pukul 18.00 hingga 01.00. untuk memanfaatkan waktu yang terbatas secara efisien, petugas taman nasional bunaken mengadakan program Bina Cinta Alam (BCA) yang meliputi pendidikan konservasi berbasis teknologi, pendampingan kelompok masyarakat,

dan pembinaan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP). Yang dimana pendekatan ini membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kawasan konservasi, meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang ada (Isnaeni Lukman et al., 2022). Dengan adanya implementasi strategi tersebut dapat menunjukkan upaya dalam mencapai efisiensi teknis melalui pemanfaatan teknologi dan pemberdayaan masyarakat, guna mencapai tujuan konservasi secara optimal meskipun dengan keterbatasan sumber daya.

2.1.5 Tujuan Efisiensi

Efisiensi anggaran juga bertujuan untuk mencegah pemborosan, dengan memastikan bahwa pengeluaran dilakukan secara bijak dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Selain itu, efisiensi anggaran sangatlah penting bagi pemerintah dan jajarannya, dengan adanya pengukuran efisiensi dapat menunjukkan apakah suatu rencana dapat tercapai dengan pendanaan yang minimal (Prasetyo & Nugraheni, 2020)

Yang menjadi tujuan efisiensi anggaran pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kementerian atau lembaga yaitu untuk memastikan bahwa penggunaan dana Negara yang dialokasikan untuk kegiatan yang berdampak langsung bagi instansi, serta program-program yang mendukung lainnya dapat dilakukan tepat sasaran sesuai prioritas yang ada. Pengelolaan yang transparan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran sehingga masyarakat dapat mengetahui dana yang digunakan dan dampaknya terhadap konservasi alam.

2.2 Konsep Akuntansi Pemerintah

2.2.1 Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Pemerintah merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola, mencatat, melaporkan, dan mengaudit transaksi keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, termasuk pengelolaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun lembaga-lembaga Negara (Efisiensi & Negara, 2024). Teori akuntansi pemerintah dalam pengelolaan APBN di instansi khususnya di kementerian atau lembaga sangat

penting untuk memastikan penggunaan dana negara dilakukan secara efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntansi pemerintah memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana dana publik digunakan dan memastikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah pedoman yang digunakan untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan tercatat dengan benar dan laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ada. Penerapan SAP memastikan bahwa dana yang diterima dari APBN tercatat dengan jelas dan transparan, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dan lembaga pengawas. Salah satu sistem penting dalam pengelolaan anggaran adalah anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), di mana dana dialokasikan berdasarkan hasil yang ingin dicapai, bukan hanya kebutuhan administratif.

Dengan sistem anggaran berbasis kinerja, setiap pengeluaran anggaran bisa diukur sesuai dengan hasil yang diinginkan. Prinsip akuntabilitas dan transparansi juga sangat penting dalam pengelolaan APBN. Akuntabilitas berarti instansi dapat bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang diterima dan harus siap memberikan penjelasan tentang bagaimana dana tersebut digunakan. Transparansi memastikan bahwa informasi tentang pengelolaan anggaran dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat bisa memantau penggunaan dana tersebut. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui apakah dana tersebut digunakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.2 Tujuan Akuntansi Pemerintah

Penerapan akuntansi pemerintah dalam pengelolaan APBN sangat berhubungan dengan efisiensi penggunaan anggaran karena akuntansi pemerintah memberikan sistem yang jelas dan terstruktur untuk mengelola dana yang diterima. Dengan prinsip-prinsip akuntansi yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan anggaran berbasis kinerja, pengelolaan anggaran menjadi lebih terarah dan fokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran berbasis kinerja membantu memastikan bahwa dana yang diterima digunakan untuk mencapai hasil yang nyata, seperti kegiatan atau program yang menjadi

prioritas bagi instansi atau yang membawa dampak langsung bagi instansi tersebut. Hal ini mendukung efisiensi karena dana dialokasikan hanya untuk kegiatan yang benar-benar mendukung tujuan konservasi.

Prinsip transparansi memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk memantau penggunaan anggaran dengan lebih mudah dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan benar sesuai peruntukannya.⁴ Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa pihak Instansi dapat mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran yang dilakukan, sehingga tidak ada ruang untuk penyalahgunaan atau pengeluaran yang tidak perlu. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, masyarakat dapat lebih percaya bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.

2.3 Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Konservasi

2.3.1 Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) sangat berkaitan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang pengelolaan APBN, karena instruksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara lebih efisien dan tepat sasaran. Instruksi tersebut mengarahkan agar dana yang diberikan digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat besar, seperti pelestarian ekosistem. Dalam hal ini, pengelolaan anggaran harus difokuskan pada kegiatan yang mendukung konservasi alam, seperti menjaga terumbu karang, melindungi spesies langka, dan mengedukasi masyarakat untuk menjaga kelestarian alam. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 menekankan pengurangan pemborosan dan penggunaan anggaran dengan cara yang lebih efektif. Artinya, setiap dana yang dialokasikan untuk kegiatan konservasi yang harus benar-benar digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti pengawasan kawasan dan upaya pencegahan kerusakan ekosistem. Misalnya, dana yang digunakan untuk patroli atau kampanye kebersihan harus bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, seperti mengurangi sampah plastik di laut yang dapat merusak terumbu karang.

Selain itu, instruksi ini juga mengharuskan adanya evaluasi kinerja yang rutin untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran memberikan hasil

yang positif. Misalnya, penggunaan dana untuk riset konservasi harus menunjukkan hasil yang jelas, seperti peningkatan kondisi terumbu karang atau perlindungan terhadap spesies yang terancam punah. Dengan adanya evaluasi ini, pengelolaan anggaran di kementerian/lembaga yang berhubungan langsung dengan kegiatan konservasi bisa lebih terarah dan efisien. Secara keseluruhan, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 membantu pengelolaan konservasi dengan menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini memastikan bahwa dana yang digunakan untuk konservasi benar-benar memberikan manfaat bagi lingkungan dan mendukung pelestarian alam.

2.3.2 Pengelolaan Keuangan Sektor Lingkungan

Pengelolaan keuangan sektor lingkungan sangat terkait dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN, karena instruksi tersebut menekankan pentingnya penggunaan anggaran negara secara efisien, transparan, dan akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan konservasi, instruksi ini memastikan bahwa dana yang diterima dari APBN digunakan secara optimal untuk mendukung pelestarian alam, seperti perlindungan terumbu karang, pengawasan kawasan, riset ilmiah, serta program edukasi kepada masyarakat. Efisiensi yang dimaksud mencakup pengurangan pemborosan, sehingga setiap pengeluaran anggaran diarahkan pada kegiatan yang memberikan hasil maksimal bagi konservasi dan keberlanjutan ekosistem. Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting, karena instruksi ini mengharuskan pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi secara baik oleh lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memungkinkan masyarakat dan pihak terkait lainnya memantau penggunaan anggaran. Evaluasi berkala terhadap kinerja pengelolaan anggaran juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar memberikan dampak positif, seperti meningkatkan kondisi terumbu karang atau melindungi spesies langka. Dengan adanya instruksi ini, pengelolaan anggaran tidak hanya dilakukan dengan hati-hati dan terstruktur, tetapi juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam

mendukung pelestarian alam melalui kegiatan yang berbasis pada hasil nyata dan terukur. Secara keseluruhan, hubungan antara pengelolaan keuangan sektor lingkungan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan konservasi digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem yang ada.

2.4 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025

Instruksi Presiden (Inpres) adalah salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk memberikan arahan, perintah, atau petunjuk kepada kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah memastikan agar program-program strategis pemerintah bisa berjalan dengan baik dan efektif di lapangan. Pada awal tahun 2025, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berpotensi merubah pendekatan pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara. Instruksi ini diambil sebagai langkah nyata untuk memastikan efisiensi dalam penggunaan anggaran APBN dan APBD (Indonesia, 2025). Presiden menegaskan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar menyesuaikan anggaran masing-masing sesuai dengan kebijakan ini, termasuk melakukan pengurangan hingga 90% pada beberapa pos belanja tertentu. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan lebih efisien dan efektif. Melalui penghematan yang signifikan, diharapkan setiap pengeluaran mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah (Aziz & Zakir, 2022).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran dan khususnya juga dalam pelaksanaan program konservasi yang dilakukan secara efisien dan efektif. Kawasan konservasi laut yang memiliki keanekaragaman hayati luar biasa tentu memerlukan pengelolaan yang bijaksana. Penerapan Inpres ini mendorong pengelola kawasan konservasi untuk melakukan berbagai langkah strategis, seperti memangkas anggaran yang tidak berdampak langsung terhadap

konservasi, mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah koordinasi dan pengawasan.

Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas program, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak yang nyata bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan pendekatan ini dapat memastikan bahwa program-program konservasi tetap berjalan dengan baik, bahkan dalam situasi keterbatasan anggaran. Secara keseluruhan, Instruksi Presiden bukan hanya sebuah perintah administratif, tapi juga menjadi panduan strategis yang mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Khusus di kawasan konservasi seperti Bunaken, Inpres memberikan arah yang jelas tentang bagaimana pengelolaan kawasan bisa berjalan dengan lebih terukur, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini bukan hanya berdampak pada kelestarian lingkungan, tetapi juga membantu memberdayakan masyarakat lokal, menciptakan kolaborasi yang lebih luas, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memberikan manfaat jangka panjang. Dengan begitu, tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dengan lebih baik, dan tetap terjaga sebagai salah satu kekayaan alam Indonesia yang berharga.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa penelitian yang terdahulu yang membahas tentang dampak *efisiensi* pengelolaan APBN. Adapun penelitian yang dimaksud peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

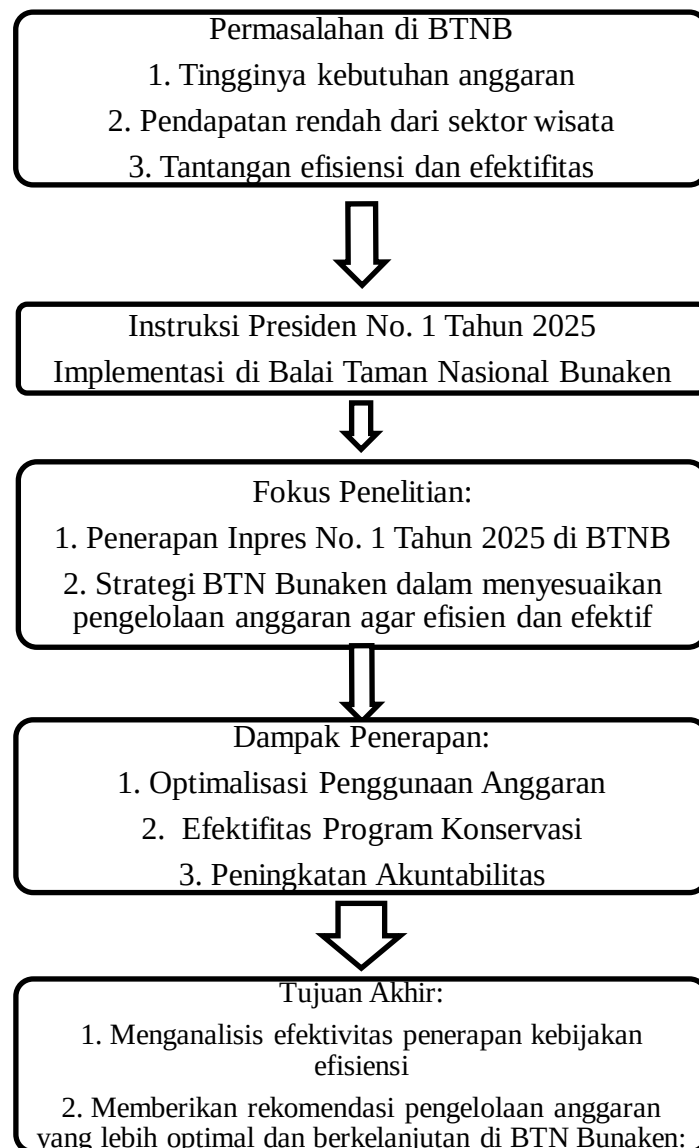
Nama Peneliti	Judul penelitian	Metode	Hasil	Persamaan
(Wahyudi et al., 2024))	Analisis Transparansi, Efisiensi, dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kantor Gubernur Sumatera	Analisis deskriptif kualitatif	transparansi dan akuntabilitas memiliki peran yang sangat vital dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk	Membahas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan

	Barat		menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik	
Ardin Umar, Jamiludin Hasan, Saiful Tanimbar (2021)	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran: Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai	Analisis rasio efisiensi dan efektivitas	Pengelolaan anggaran pada BPDP Pulau Morotai periode 2017-2019 efisien dengan rata-rata 1.16% dan efektif dengan rata-rata 97,27%	Membahas Efisiensi dan Efektivitas pengelolaan Anggaran
Andri Meiriki, Adi Mushariantono, Novitri Landong NS (2020)	Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis rasio efektivitas dan efisiensi	Pengelolaan keuangan Tanggerang Selatan sangat efektif dan cukup efisien	Membahas Efisiensi dan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah
M. Iqbal Febriansyah, Jauzari Helmi, Kevin Immanuel Manurung, M.Tsaqif Rafii (2025)	Peran Administrasi Negara dalam Pengelolaan Keuangan Publik	Pendekatan deskriptif kualitatif	Penerapan prinsip tata kelola yang baik meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik	Membahas peran administrasi Negara dalam pengelolaan keuangan publik
(Windyatama et al., 2024)	Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser	Deskriptif kualitatif	Evaluasi kepatuhan dan efektivitas penerimaan PNBP	Sama-sama membahas efisiensi dalam pengelolaan keuangan taman nasional
Christofora Erika Kapele, Jerry Sonny	Analisis Kinerja Keuangan pada PT Bank Sulutgo Cabang Calaca Manado	Metode kuantitatif	Penelitian ini menggunakan metode CAMEL menunjukkan bahwa bank ini berada dalam kondisi	Keduanya sama-sama berfokus pada efisiensi dan kinerja keuangan,

Lintong, Nixon Sondakh, Raykes Hinrich Tuerah (2022)			keuangan yang sehat, dengan nilai CAMEL tahun 2018 sebesar 98,46 dan tahun 2019 sebesar 86,84 , menandakan kemampuan bank dalam menjaga solvabilitas, likuiditas, dan profitabilitasnya	namun berbeda dalam objek, metode, dan tujuan; penelitian Bank SulutGo mengevaluasi stabilitas perbankan, sedangkan penelitian APBN menilai efektivitas kebijakan anggaran pemerintah.
Wahyuni & Hernusa, (2021)	Tinjauan atas Penyusunan Anggaran Belanja pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	metode kualitatif	Penelitian ini mengevaluasi keakuratan pencatatan, kepatuhan pengelolaan, dan tingkat efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Hasilnya menunjukkan kepatuhan yang baik dan efektivitas penerimaan yang tinggi.	evaluasi pengelolaan keuangan di balai taman nasional.

Berdasarkan keempat penelitian di atas, peneliti mendapati bahwasanya efisiensi terhadap pengelolaan anggaran membawa pada umumnya membawa pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian penerapan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi pengelolaan APBN menjadi penelitian yang terbaharukan yang akan di lakukan peneliti. Keempat penelitian di atas menjadi landasan yang kuat bagi peneliti untuk melakukan analisis mengenai dampak penerapan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 Tentang efisiensi pengelolaan APBN pada Balai Taman Nasional Bunaken.

2.6 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir ini menunjukkan alur pemikiran peneliti dalam mengkaji penerapan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 di Balai Taman Nasional Bunaken (BTNB).

Penelitian diawali dari permasalahan utama yang dihadapi BTNB, yaitu tingginya kebutuhan anggaran, rendahnya pendapatan wisata, serta tantangan dalam efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 hadir sebagai kebijakan strategis untuk mendorong efisiensi, efektivitas,

dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. BTNB sebagai pengelola kawasan konservasi perlu menyesuaikan strategi pengelolaannya agar selaras dengan kebijakan ini. Fokus penelitian diarahkan untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan di BTNB dan bagaimana strategi efisiensi anggaran dilakukan. Tujuan akhirnya adalah mengevaluasi efektivitas kebijakan efisiensi ini serta memberikan rekomendasi agar pengelolaan anggaran di BTNB menjadi lebih optimal dan berkelanjutan.

Penerapan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 sangat penting bagi BTNB untuk menjawab tantangan keterbatasan anggaran. Dengan strategi yang tepat, BTNB dapat tetap menjaga kelestarian kawasan sekaligus mewujudkan pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dalam konteks penelitian ini, evaluasi dilakukan untuk memahami bagaimana kebijakan efisiensi anggaran diterapkan, sejauh mana dampaknya terhadap keberlanjutan pengelolaan taman nasional, serta kendala yang dihadapi dalam proses implementasinya.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Beberapa penelitian terdahulu juga ada yang menggunakan metode kualitatif deskriptif seperti pada penelitian dengan judul “Analisis Transparansi, Efisiensi, dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kantor Gubernur Sumatera Barat” , dimana pada penelitian ini bahwa pencatatan keuangan sudah sesuai standard an optimalisasi belanja operasional juga telah dilakukan pengurangan pengeleuran yang tidak prioritas dan melalui metode penelitian kualitatif deskriptif ditemukan bahwa kantor Gubernur Sumatera Barat telah berupaya meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dengan melalui cara melalui pengurangan biaya operasional dengan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi, optimalisasi sumber daya manusia melalui pelatihan dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, serta pemantauan ketat terhadap belanja daerah guna mengurangi pemborosan dan memastikan dana dialokasikan sesuai kebutuhan.

Melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, penelitian “Analisis Penerapan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Pengelolaan APBN Pada Balai Taman Nasional Bunaken” akan mengidentifikasi nuansa dan kompleksitas yang mungkin terlewatkan oleh pendekatan kuantitatif. Fokus utamanya adalah memahami makna dan pengalaman individu dalam konteks kebijakan tersebut, serta bagaimana

kebijakan tersebut mempengaruhi berbagai aspek pengelolaan, seperti program konservasi, interaksi dengan masyarakat, dan layanan wisatawan. Dengan demikian, penelitian kualitatif memberikan wawasan yang kaya dan komprehensif, yang esensial untuk pengambilan keputusan yang tepat dan berkelanjutan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Balai Taman Nasional Bunaken yang di bawah naungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lebih spesifik Balai Taman Nasiona Bunaken di bawah tanggung jawab Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE). Balai Taman Nasional Bunaken beralamatkan di jl. Bailang Raya, Molas, Bunaken Manado, Sulawesi Utara. Penelitian ini berlangsung dalam rentang waktu Maret 2025 hingga Mei 2025. Rentang waktu ini dapat memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data serta informasi yang di perlukan oleh penulis.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data ini didapatkan secara langsung dari hasil wawancara dan observasi pada karyawan yang ada dengan mewawancari sejauh mana penerapaaan instruksi presiden no 1 tahun 2025 dan apa dampak efektivitas dan efisiensi pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan oleh peneliti pada Balai Taman Nasional Bunaken dan data yang lebih objektif seperti Rencana Anggaran dan Kerja(RKA-L/K) dan SOP baru yang diperbarui terkait pelaksanaan Instruksi Presiden, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) tahun 2025, dan Laporan realisasi anggaran.

3.3.2 Data Sekunder

Dalam penelitian data ini didapatkan dari buku akuntansi pemerintah yang menjelaskan, jurnal, artikel, bahkan skripsi atau tesis yang berhubungan atau berkaitan dengan penelitian ini seperti jurnal atau artikel yang.

Pertama bersumber dari buku-buku ilmiah yang membahas tentang manajemen keuangan publik, kebijakan anggaran, dan administrasi Negara seperti buku “Akuntansi Sektor Publik” karya Mardiasmo. Kedua Peneliti juga menggunakan Jurnal-jurnal Ilmiah nasional bahkan internasional yang relevan dengan topic penelitian seperti “Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang” oleh Alimuddin, Firman, dan Hasanudin Damis, juga ada jurnal yang menyoroti tentang pengelolaan anggaran pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dimana diketahui berhubungan langsung dengan Balai Taman Nasional Bunaken seperti “Tinjauan Proses Penyusunan Anggaran Belanja Pada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan”. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan dokumen kebijakan resmi, seperti naskah asli Inpres No. 1 Tahun 2025, petunjuk teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta rencana strategis dan laporan kinerja dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan laporan realisasi anggaran, DIPA, dan data perencanaan kegiatan tahun anggaran 2025 dari Balai Taman Nasional Bunaken juga digunakan untuk melakukan perbandingan dan melihat tren efisiensi yang dicapai setelah Inpres diberlakukan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya penelitian kualitatif dalam pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data yang umum seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.4.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan mengamati objek secara langsung untuk memahami bagaimana penerapan kebijakan instruksi presiden terhadap efisiensi anggaran pendapatan belanja Negara pada Balai Taman Nasional Bunaken.

3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan antar dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi atau pendapat tertentu, untuk mendapatkan informasi dari informan seperti dari pejabat Balai Taman Nasional Bunaken atau bahkan pegawai yang ada di bidang akuntansi untuk mendapatkan pendapat yang lebih mendetail tentang sejauh mana penerapan instruksi presiden no 1 tahun 2025 dan apa dampak efektivitas dan efisiensi pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan.

3.4.3 Dokumentasi

Data yang diperoleh dari Balai Taman Nasional Bunaken sebagian besar melalui observasi dan wawancara. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen kebijakan dan prosedur akuntansi yang relevan dengan penerapan Instruksi Presiden mengenai pengelolaan pada APBN.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan tahap-tahap proses analisis sebagai berikut:

3.5.1 Pengumpulan Data

Mengumpulkan data, keterangan, dan informasi yang relevan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data yang akan dikumpulkan meliputi Teks Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, Dokumen perencanaan dan laporan keuangan APBN Balai Taman Nasional Bunaken sebelum dan sesudah penerapan instruksi presiden, Data realisasi anggaran, program, dan kegiatan Balai Taman Nasional Bunaken, Hasil wawancara dengan pihak terkait (pegawai Balai Taman Nasional Bunaken, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dll.), dan Dokumen terkait program dan kegiatan di Balai Taman Nasional Bunaken.

3.5.2 Analisis isi

Menganalisis isi Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 bertujuan memahami isi utama serta yang mengatur tentang efisiensi APBN. Dalam konteks ini diperlukan analisis dengan menelaah dokumen-dokumen resmi

seperti teks instruksi presiden, petunjuk teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dan juga dokumen yang berhubungan langsung dengan berjalannya kegiatan konservasi di Balai Taman Nasional Bunaken seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025

Untuk dapat menganalisis dokumen diperlukan teknik analisis isi tematik dimana mengidentifikasi tema-tema utama dari instruksi tersebut seperti, Efisiensi belanja, pengurangan kegiatan yang tidak berdampak langsung, penguatan pengawasan, dan digitalisasi kemudian menyusun perintah tersebut dengan tindakan nyata di Balai Taman Nasional Bunaken

3.5.3 Analisis Dampak

Analisis dampak dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan efisiensi yang tercantum dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 telah memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan di Balai Taman Nasional Bunaken. Data yang digunakan meliputi perbandingan alokasi dan realisasi anggaran tahun 2024 dan 2025, data kegiatan yang dilakukan, hasil wawancara dengan pejabat dan staf balai, serta hasil observasi langsung di lapangan.

Dampak dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis tematik, di mana hasil wawancara dan observasi dikodekan dan diklasifikasikan ke dalam tema-tema seperti efisiensi belanja operasional, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan persepsi pegawai terhadap kebijakan efisiensi yang diterapkan

3.5.4 Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dimana peneliti akan menarik kesimpulan tentang penerapan efisiensi pengelolaan APBN pasca keluarnya kebijakan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 serta memberikan saran pada pihak Balai Taman Nasional Bunaken.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Balai Taman Nasional Bunaken

Balai Taman Nasional Bunaken adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola Taman Nasional Bunaken, sebuah kawasan konservasi laut yang sangat penting di Indonesia. Kawasan ini terletak di Provinsi Sulawesi Utara dan mencakup wilayah daratan dan lautan dengan luas sekitar 89.065 hektar, termasuk lima pulau utama, yaitu Pulau Bunaken, Manado Tua, Siladen, Mantehage, dan Nain. Kawasan ini resmi ditetapkan sebagai taman nasional pada tanggal 15 September 1991 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 730/Kpts-II/1991. Sebelum menjadi kawasan konservasi resmi, wilayah Bunaken sudah dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi dan menjadi destinasi favorit bagi para penyelam, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak, perusakan terumbu karang, serta pariwisata yang belum dikelola dengan baik menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian ekosistem laut di kawasan ini. Oleh karena itu, pemerintah menentukannya sebagai taman nasional, dengan pengelolaan langsung oleh Balai Taman Nasional Bunaken yang berada di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari instansi pemerintah pusat, Balai Taman Nasional Bunaken dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan di balai ini harus mengikuti kebijakan pemerintah, salah satunya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Pengelolaan APBN. Inpres ini diterbitkan untuk memastikan bahwa semua lembaga pemerintah bisa menggunakan anggaran secara lebih hemat, efektif, dan tepat sasaran. Dengan kata lain, belanja negara harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, menghindari pemborosan, serta memberi manfaat yang jelas dan terukur. Dalam konteks Balai Taman Nasional

Bunaken, kebijakan efisiensi ini mendorong agar program-program konservasi lingkungan, pengawasan kawasan, hingga pemberdayaan masyarakat tetap bisa berjalan maksimal meskipun dengan anggaran yang terbatas. Ini menjadi tantangan tersendiri karena pengelolaan kawasan konservasi memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana latar belakang, tujuan, serta peran Balai TNB dapat mendukung penerapan efisiensi anggaran sesuai dengan arahan Inpres tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya, Balai Taman Nasional Bunaken memiliki visi kelembagaan yang sangat jelas, yaitu: "*Menjadi pengelola kawasan konservasi laut yang profesional dan berkelanjutan untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat.*". Visi ini menunjukkan bahwa Balai TNB tidak hanya fokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga berkomitmen pada tata kelola yang baik dan memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar kawasan. Untuk mencapai visi tersebut, Balai TNB memiliki empat misi utama, yaitu:

1. Menyelenggarakan konservasi sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan, artinya menjaga dan merawat lingkungan laut dan darat agar tetap lestari untuk generasi sekarang dan masa depan.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan taman nasional, sehingga pengelolaan kawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat lokal dan mitra lainnya.
3. Mengembangkan ekowisata berbasis konservasi, yaitu memanfaatkan potensi wisata alam tanpa merusak lingkungan, dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat sekitar.

Memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, agar seluruh pegawai dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan taman nasional memiliki kemampuan dan integritas dalam bekerja secara profesional.

Dengan landasan visi dan misi tersebut, Balai Taman Nasional Bunaken terus berupaya menyusun program kerja yang lebih terarah, efisien, dan memberikan hasil nyata. Dalam kaitannya dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, visi dan misi ini juga menjadi panduan agar setiap program yang didanai oleh APBN benar-benar sesuai dengan tujuan konservasi, tidak tumpang tindih, dan mampu memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, efisiensi bukan berarti pengurangan kualitas kerja, tetapi lebih kepada cara bekerja yang lebih cerdas, transparan, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, penerapan kebijakan efisiensi pengelolaan APBN di Balai Taman Nasional Bunaken sangat penting untuk dikaji lebih dalam, terutama untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut mendukung tercapainya tujuan konservasi dan pelayanan publik yang optimal di kawasan ini.

4.1.2 Struktur organisasi

Adapun Struktur beserta tugas dan wewenang dari kepegawaian di Balai Taman Nasional Bunaken adalah sebagai berikut:

A. Kepala Balai

Tugas-tugas Kepala Balai mencakup antara lain Menyusun dan mengarahkan pelaksanaan rencana kerja tahunan berdasarkan kebijakan konservasi dan prioritas program nasional, Mengelola dan mengawasi penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN agar sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Mengoordinasikan kegiatan antar bagian dan seksi dalam struktur Balai, termasuk Seksi Pengelolaan Wilayah dan Subbagian Tata Usaha. Melakukan evaluasi dan pelaporan kinerja lembaga, baik secara internal kepada kementerian maupun eksternal kepada pemangku kepentingan lain. Menjalin kerja sama dan komunikasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, LSM, masyarakat, akademisi, serta mitra internasional yang terlibat dalam program konservasi. Menyelesaikan permasalahan teknis atau konflik yang timbul di lapangan, baik yang berkaitan dengan pelanggaran kawasan, tumpang tindih pemanfaatan, maupun tantangan pengawasan,

dan Memastikan bahwa seluruh kegiatan dan pegawai menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan tentang pengelolaan keuangan negara dan tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Kepala Subbagian Tata Usaha

Kasubag Tata Usaha Balai Taman Nasional Bunaken memegang peran sentral dalam memastikan kelancaran operasional balai melalui pengelolaan berbagai aspek administratif. Tugas utamanya meliputi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan administrasi umum seperti surat-menyurat dan kearsipan, serta urusan kepegawaian mulai dari perencanaan hingga pengelolaan data. Selain itu, kasubag juga bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya, termasuk aset dan sarana prasarana balai. Mereka juga berperan dalam pelayanan rumah tangga kantor, koordinasi internal dan eksternal, serta penyusunan laporan rutin dan insidentil.

C. Kepala seksi pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1

Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi dimana kepala seksi PTN wilayah 1 mengelola kawasan yang menjadi perlindungan utama balai taman nasional bunbaken yaitu mencakup 5 wilayah yaitu pulau bunaken, pulau nain, pulau mantehage, pulau siladen, dan pulau manado tua, kemudian dari setiap wilayah tersebut memiliki kepala resor pengelolaan taman nasional dari 5 wilayah tersebut agar pengelolan di setiap wilayah dapat terkoordinir dengan baik setiap pengelolaan konservasi, khususnya pada wilayah bunaken yang menjadi kawasan utama yang di utamakan pengelolaannya di karenakan taman nasional bunaken adalah wilayah yang perlu di jaga kelestariannya.

D. Kepala seksi pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2

Tugas dan wewenang Kepala seksi pengelolaan taman nasional wilayah 2 sama seperti pada wilayah 1 tetapi hanya berbeda tempat wilayah pengelolaannya. Wilayah pengelolaan kepala seksi pengelolaan

taman nasional wilayah 2 terdapat 3 wilayah yaitu pulau popareng, sondaken, dan poopoh yang terletak dibagian Taman Nasional Bunaken, dimana pada wilayah ini memiliki ekosistem seperti terumbu karang dan biota laut yang dilindungi seperti penyu, dugong, dan lainnya. Pada wilayah 2 juga memiliki kepala resor pada setiap pulau agar setiap wilayahnya dapat terkoordinir dengan baik pengelolaan kawasan konservasinya.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional masing-masing serta sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

4.2 Hasil Penelitian

Balai Taman Nasional Bunaken (BTNB) merupakan salah satu satuan kerja di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertugas melaksanakan konservasi kawasan perairan dan darat di wilayah Taman Nasional Bunaken. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BTNB menerima alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun yang digunakan untuk mendukung program kerja dan kegiatan konservasi.

Balai Taman Nasional Bunaken (BTNB) merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berperan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BTNB menerima alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjalankan dua program utama, yakni:

1. **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** seperti, Konservasi spesies dan genetik, Pemanfaatan jasa dan lingkungan kawasan suaka alam, Konservasi ekosistem dan pembinaan areal preservasi, Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, Pengelolaan Kawasan Suaka alam(KSA), kawasan pelestarian alam(KPA), dan Taman Baru (TB)
2. **Program Dukungan Manajemen**, seperti Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Lainnya Ditjen KSDAE.

Berikut data laporan realisasi anggaran dari bulan januari 2025 hingga april 2025:

A. Bulan Januari 2025

PROGRAM	Indikator Program	Januari 2025	
		Anggaran	Realisasi
Program pengelolaan hutan berkelanjutan	Konservasi Spesies dan genetik		
	Pemanfaatan jasa dan lingkungan kawasan suaka alam		
	Konservasi ekosistem dan pembinaan areal preservasi		
	Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati		
	Pengelolaan Kawasan Suaka alam(KSA), kawasan pelestarian alam(KPA), dan Taman Baru (TB)		
	JUMLAH PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Lainnya Ditjen KSDAE	7.433.527.000	7.578.024.000
	JUMLAH PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	7.433.527.000	7.578.024.000
TOTAL		7.433.527.000	7.578.024.000

Sumber: BTNB 2025

Gambar 4.2-1 Data RKA-KL dan DIPA bulan Januari 2025

Berdasarkan perbandingan Bulan Januari 2024 dan Bulan Januari 2025 belum di terapkan Instruksi presiden no.1 Tahun 2025 pada Balai Taman Nasional Bunaken tetapi pada bulan januari Tahun 2025 setelah terealisasinya anggaran terjadi pemblokiran belanja modal yang dimana membuat realisasi menjadi lebih besar dari pada anggarannya yaitu dengan selisih Rp. 144.497.000.

B. Bulan Februari 2025

PROGRAM	Indikator Program	Februari 2025	
		Anggaran	Realisasi
Program pengelolaan hutan berkelanjutan	Konservasi Spesies dan genetik	265.000.000	265.000.000
	Pemanfaatan jasa dan lingkungan kawasan suaka alam	110.000.000	110.000.000
	Konservasi ekosistem dan pembinaan areal preservasi	300.000.000	300.000.000
	Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati	555.000.000	555.000.000
	Pengelolaan Kawasan Suaka alam(KSA), kawasan pelestarian alam(KPA), dan Taman Baru (TB)	791.000.000	791.000.000
	JUMLAH PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.021.000.000	2.021.000.000
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Lainnya Ditjen KSDAE	8.328.024.000	8.328.024.000
	JUMLAH PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	8.328.024.000	8.328.024.000
TOTAL		10.349.024.000	10.349.024.000

Sumber: BTNB 2025

Gambar 4.2-2 Data RKA-KL dan DIPA bulan Februari 2025

Pada februari tahun 2025 beberapa program sudah berjalan dan pada bulan februari 2025 belum terjadi penerapan Instruksi Presiden no. 1 Tahun 2025.

C. Bulan Maret 2025

PROGRAM	Indikator Program	Maret	
		Anggaran	Realisasi
Program pengelolaan hutan berkelanjutan	Konservasi Spesies dan genetik	240.000.000	240.000.000
	Pemanfaatan jasa dan lingkungan kawasan suaka alam		
	Konservasi ekosistem dan pembinaan areal preservasi	118.715.000	118.715.000
	Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati	175.510.000	175.510.000
	Pengelolaan Kawasan Suaka alam(KSA), kawasan pelestarian alam(KPA), dan Taman Baru (TB)	2.162.461.000	2.162.461.000
	JUMLAH PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.696.686.000	2.696.686.000
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Lainnya Ditjen KSDAE	7.433.527.000	7.433.527.000
	JUMLAH PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	7.433.527.000	7.433.527.000
TOTAL		10.130.213.000	10.130.213.000

Sumber: BTNB 2025

Gambar 4.2-3 Data RKA-KL dan DIPA bulan Maret 2025

Pada Bulan Maret 2025 Balai Taman Nasional Bunaken Mulai menerapkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dari data tersebut pada program konservasi spesies dan genetik terjadi efisiensi yang mana sebelum penerapan sebesar Rp. 265.000.000 pada bulan Maret menjadi Rp. 240.000.000 dengan selisih Rp. 25.000.000 program pemanfaatan jasa dan lingkungan suaka alam di hapuskan sesuai dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 kemudian pada program konservasi ekosistem terjadi efisiensi yang sebelumnya sebesar Rp. 300.000.000 pada bulan Maret menjadi Rp. 118.715.000 dengan selisih Rp. 181.285.000 , pada program perencanaan konservasi keanekaragaman hayati terjadi efisiensi yang mana sebelum penerapan sebesar Rp. 555.000.000 dan sesudah penerapan menjadi 175.510.000 dengan selisih Rp. 379.490.000 kemudian pada pengelolaan kawasan suaka alam dikarenakan adanya Anggaran Biaya Tambahan (ABT) yang dimana membuat anggaran pada program ini di bulan Maret tahun 2025 menjadi lebih besar dari anggaran sebelum terjadi penerapan yang mana sebelumnya sebesar Rp. 791.000.000 dan sesudah penerapan Inpres di bulan Maret menjadi sebesar Rp. 2.162.461.000 sehingga terjadi kelebihan sebesar Rp. 1.371.461.000 yang tidak menunjukkan adanya efisiensi dan yang terakhir pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya terjadi

efisiensi yang mana anggaran sebelumnya sebesar Rp. 8.328.024.000 dan pada bulan Maret setelah di terapkan Inpres menjadi Rp. 7.433.527.000 dengan selisih Rp. 894.497.000.

D. Bulan April 2025

PROGRAM	Indikator Program	Apr-24	
		Anggaran	Realisasi
Program pengelolaan hutan berkelanjutan	Konservasi Spesies dan genetik	240.000.000	240.000.000
	Pemanfaatan jasa dan lingkungan kawasan suaka alam		
	Konservasi ekosistem dan pembinaan areal preservasi	118.715.000	118.715.000
	Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati	175.510.000	175.510.000
	Pengelolaan Kawasan Suaka alam(KSA), kawasan pelestarian alam(KPA), dan Taman Baru (TB)	2.162.461.000	2.162.461.000
	JUMLAH PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.696.686.000	2.696.686.000
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Lainnya Ditjen KSDAE	7.433.527.000	7.433.527.000
	JUMLAH PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	7.433.527.000	7.433.527.000
TOTAL		10.130.213.000	10.130.213.000

Sumber: BTNB 2025

Gambar 4.2-4 Data RKA-KL dan DIPA bulan April 2025

Pada bulan April 2025 terjadi efisiensi dengan anggaran yang sama seperti pada bulan Maret yang mana pada keseluruhannya mendapat selisih sebesar Rp. 218.118.000 yang di dapatkan dari anggaran sebelum penerapan inpres sebesar Rp. 10. 349.024.000 dan setelah penerapan menjadi Rp. 10.310.213.000.

4.2.1 Analisis Efisiensi

Instruksi presiden no. 1 tahun 2025 tentang efisiensi pengelolaan APBN hadir sebagai upaya strategis pemerintah untuk mengurangi pemborosan yang mendorong instansi pemerintah, termasuk Balai Taman Nasional Bunaken, untuk mengefektifkan penggunaan anggaran untuk itu analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan rincian kegiatan output pada kegiatan yang terjadi efisiensi, yang dimana RKA-KL dan DIPA bulan Maret dan April Tahun 2024 yang belum terjadi penerapan instruksi Presiden dengan RKA-KL dan DIPA bulan Maret Tahun 2025 dan April Tahun 2025 dikarenakan instruksi presiden mulai diterapkan pada bulan Maret tahun 2025, dengan rumus sebagai berikut:

% efisiensi= (selisih anggaran lama dan baru/anggaran lama)x100

Berikut adalah rincian program yang kegiatannya mengalami efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025:

Tabel 4.2.1-1 Analisis efisiensi sebelum dan sesudah penerapan Inpres No. 1 Tahun 2025

program	rincian output	Sebelum penerapan Inpres no. 1 tahun 2025			Setelah penerapan Inpres no. 1 tahun 2025			Selisih	Efisiensi %
		volume/satuan	anggaran	realisasi	volume/satuan	anggaran	realisasi		
Konservasi Spesies dan genetik	Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar	5 Lokasi	100.000.000	100.000.000	5 Lokasi	150.000.000	150.000.000		
	Pengembangan Bioprospeksi sumber daya genetik spesies liar	1 Spesies	75.000.000	75.000.000	-	0	0		
	Total		175.000.000	175.000.000		150.000.000	150.000.000	25.000.000	14,28571429
Pemanfaatan Jasa Lingkungan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman baru	sosialisasi, promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam , kawasan pelestarian alam ,dan taman buru	1.250 orang	50.000.000	50.000.000	-	0	0		
	Peningkatan pemanfaatan dan pemasaran lingkungan wisata alam dikawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru	2 dokumen	60.000.000	60.000.000	-	0	0		
	Total		110.000.000	110.000.000		0	0	110.000.000	100
Konservasi ekosistem dan pembinaan areal preservasi	Fasilitasi pengembangan pengelolaan areal preservasi	0.02 hektar	300.000.000	300.000.000	0.02 hektar	118.715.000	118.715.000		
	Total		300.000.000	300.000.000		118.715.000	118.715.000	181.285.000	60,42833333
Perencanaan konservasi Keanekaragaman hayati	Optimalisasi tata kelola kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru	1 dokumen	80.000.000	80.000.000	1 dokumen	62.200.000	62.200.000		
	Penguatan Perencanaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru	1 dokumen	475.000.000	475.000.000	1 dokumen	113.310.000	113.310.000		
	Total		555.000.000	555.000.000		175.510.000	175.510.000	379.490.000	68,37657658
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Dan Taman Buru	Masyarakat yang di libatkan dalam kegiatan konservasi kawasn dan keanekaragaman hayati	6 orang	95.000.000	95.000.000	6 orang	5.710.000	5.710.000		
	Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat	3 Kelompok	75.000.000	75.000.000	3 Kelompok	44.520.000	44.520.000		
	Total		170.000.000	170.000.000		50.230.000	50.230.000	119.770.000	70,45294118
Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen konservasi Sumber daya alam dan ekosistem	Layanan Umum	1 Layanan	750.000.000	750.000.000	1 Layanan	225.000.000	225.000.000		
	Layanan Perkantoran	1 layanan	7.578.024.000	7.578.024.000	1 layanan	7.208.527.000	7.208.527.000		
	Total		8.328.024.000	8.328.024.000		7.433.527.000	7.433.527.000	894.497.000	10,74080718
TOTAL			9.638.024.000	9.638.024.000		7.927.982.000	7.927.982.000	1.710.042.000	17,74266177

A. Konservasi Spesies dan Genetik

Dimana pada program ini terdapat dua kegiatan yang terefisiensi yaitu penyelamatan jenis tumbuhan satwa liar dan Pengembangan bioprospeksi sumber daya genetik spesies liar. Dari data tersebut pada bulan maret 2025 terjadi efisiensi dengan menghapus kegiatan pengembangan bioprospeksi sumber daya genetik spesies liar tetapi pada kegiatan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar di lakukan masih pada 5 lokasi sama sebelum di tahun sebelum terjadi penerapan instruksi presiden no. tahun 2025 dengan dialokasikan anggaran dari pengembangan bioprospeksi sebesar Rp. 50.000.000 yang dimana total keseluruhan menjadi Rp. 150.000.000 sehingga dari total keseluruhan mendapat selisih Rp. 25.000.000 dengan angka presesntase 14,28%

B. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian alam, dan Taman Buru

Pada Program ini terdapat dua kegiatan yaitu yang pertama sosialisasi, promosi, dan pemasaran lingkungan wisata alam du kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru dan yang kedua peningkatan pemanfaatan dan pemasaran lingkungan wisata kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru yang sepenuhnya terjadi efisiensi dengan persentase sebesar 100% dimana kegiatan ini tidak menjadi kegiatan yang berdampak langsung terhadap kinerja utama BTNB sehingga pendanaanya tidak dilanjutkan

C. Konservasi Ekosistem dan pembinaan areal preservasi

Pada program konservasi ekosistem dan pembinaan areal preservasi di fokuskan pada fasilitasi pengembangan pengelolaan areal preservasi yang dimana areal ini memiliki nilai konservasi yang tinggi seperti habitat terumbu karang alami, hutan mangrove dan lainnya. Pada kegiatan ini anggaran dan realisasinya di bulan Februari 2025 sebesar Rp. 300.000.000 dengah wilayah pengelolaannya sebesar 0.02 hektar, setelah di terapkannya

instruksi presiden khususnya dibulan Maret 2025 terjadi efisiensi dengan selisih Rp. 181.285.000 dengan persentase efisiensinya sebesar 60,42% tetapi wilayah pengelolaannya tetap sama sebesar 0,02 hektar.

D. Perencanaan Konservasi Keanekaragaman hayati

Pada program ini terdapat dua kegiatan, yang pertama optimalisasi tata kelola kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru pada bulan Februari 2025 sebelum diterapkan instruksi presiden target outputnya dan realisasinya 1 dokumen dengan anggaran dan realisasinya sebesar Rp. 80.000.000 dan pada bulan Maret tahun 2025 BTNB Mulai menerapkan instruksi presiden sehingga terjadi efisiensi tetapi dengan target output dan realisasi yang sama yaitu 1 dokumen sebelum terjadinya efisiensi tetapi dengan anggaran dan realisasi sebesar Rp. 62.200.000 yang dimana mendapatkan selisih sebesar Rp 17.800.00 dan kegiatan yang kedua yaitu penguatan perencanaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru, dimana pada bulan maret target outputnya dan realisasinya 1 dokumen dengan anggaran dan realisasi sebesar Rp. 475.000.000 kemudian pada bulan Maret tahun 2025 terjadi efisiensi yang dimana target output dan realisasinya sama seperti di bulan Februari 2025 tetapi anggaran dan realisasi yang terpotong dan menjadi sebesar Rp. 113.310.00 yang dimana dari perbandingan ini efisiensi dengan selisih Rp. 379.490.00 dan angka persentasenya sebesar 68,37%

E. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru

Program ini melibatkan masyarakat dan kelompok dalam pengelolaannya yang dimana ada dua kegiatan yang terjadi efisiensi. Yang pertama terdapat kegiatan seperti konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati yang target output dan realisasinya pada bulan Februari 2025 sebelum diterapkan Inpres sebanyak 6 orang dengan anggaran dan realisasinya sebesar 95.000.000 sedangkan pada bulan Maret di tahun 2025 yang sudah terjadi penerapan instruksi presiden no. 1 Tahun 2025 target output dan realisasinya tetap sama tetapi anggarannya terpotong cukup besar dan realisasinya pun sesuai yang

dinggarkan yaitu sebesar Rp. 5.710.000 dan pada kegiatan kedua yaitu pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat dengan target output dan realisasinya sebanyak 3 kelompok pada bulan Februari 2025 dengan anggaran dan realisasinya sebesar Rp. 75.000.000 dan pada bulan Maret tahun 2025 dengan target output dan realisasu yang sama seperti bulan sebelumnya yang mana belum diterapkannnya Inpres no. 1 tahun 2025 yaitu sebanyak 3 kelompok tetapi anggaran yang terpangkas menjadi sebesar Rp. 44.520.00. maka jumlah selisih dari program ini di bulan maret tahun 2024 dan maret tahun 2025 sebesar Rp. 119.770.000 dengan persentase sebesar 70,45%.

F. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Pada program ini terdapat dua layanan yaitu yang pertama layanan umum yang dimana layanan ini termasuk pada penyusunan RKA-KL dan DIPA, pengelolaan kepegawaian dan SDM serta pengembangan teknologi informasi yang dimana layanan ini pada bulan Februari 2025 memiliki target output dan realisasinya 1 layanan dengan anggaran dan realisasi sebesar Rp. 750.000.000 sedangkan pada Bulan Maret tahun 2025 yang sudah di terapkannya instruksi presiden no.1 tahun 2025 dengan target output dan realisasi yang sama seperti dibulan yang sama di tahun sebelumnya yaitu 1 layanan tetapi dengan anggaran yang sudah terpangkas yaitu sebesar Rp. 225.000.000 pada anggaran dan realisasinya. Yang kedua yaitu layanan perkantoran yang dimana layanan ini termasuk pada administrasi umum, operasional dan pemeliharaan kantor, serta pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Pada bulan Februari 2025 memiliki target output dan realisasinya 1 layanan dengan anggaran dan realisasi sebesar Rp. 8.328.024.000 dan pada bulan Maret 2025 yang dimana BTNB sudah menerapkan instruksi presiden dalam layanan perkantoran terdapat target output dan realisasi yang sama seperti sebelumnya tetapi anggarannya terpangkas menjadi sebesar Rp. 7.208.527.000 dan realisasinya sesuai dengan yang di anggarkan. Maka dari perbandingan antara kedua layanan tersebut jumlah selisih anggaran dan

realisasi sebelum dan sesudah terjadinya penerapan instruksi presiden adalah sebesar Rp. 894.497.000 dengan angka persentasenya sebesar 10,74%

4.2.2 Laporan Realisasi Anggaran

Penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah mendorong efisiensi signifikan pada program-program konservasi Balai Taman Nasional Betung Kerihun (BTNB). Perubahan ini, baik melalui penghapusan kegiatan maupun pemangkasan anggaran, akan tercermin langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Secara umum, efisiensi ini akan mengakibatkan penurunan total realisasi belanja dalam LRA. Contohnya, penghapusan kegiatan bioprospeksi dan pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemotongan anggaran pada konservasi ekosistem, perencanaan keanekaragaman hayati, pengelolaan kawasan, dan dukungan manajemen, akan secara kolektif mengurangi pos-pos belanja terkait. Analisis LRA akan menjadi kunci untuk mengevaluasi sejauh mana penghematan ini tercapai dan dampaknya terhadap kinerja finansial serta operasional BTNB, meskipun beberapa target output non-finansial tetap terjaga.

Dalam konteks Balai Taman Nasional Bunaken, Inpres No. 1 Tahun 2025 harus mengoptimalkan anggaran untuk perlindungan keanekaragaman hayati, pengembangan ekowisata, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, LRA ini akan dilengkapi dengan analisis rasio efisiensi program dan kegiatan untuk mengukur seberapa efektif anggaran BTNB dalam mencapai target-target tersebut. Demikian Rumus perhitungannya:

$$\text{Rasio Efisiensi Program} = \frac{\text{Realisasi anggaran pada kegiatan}}{\text{Anggaran pada kegiatan}} \times 100\%$$

Dengan rumus demikian berikut data Laporan Realisasi Anggaran bulan Februari 2025 sebelum penerapan Instruksi Presiden dan Laporan Realisasi Anggaran April 2025 yang mana sudah diterapkan Inpres dan persentase capaiannya.

Tabel 4.2.2-1 Analisis LRA

rincian kegiatan	Februari 2025			April' 2025		
	Anggaran	realisasi	%	anggaran	realisasi	%
Konservasi Spesies dan Genetik						
Pengembangan Bioprospeksi sumber daya genetik spesies liar	75.000.000	75.000.000	100	0	0	0
Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar	100.000.000	100.000.000	100	150.000.000	150.000.000	100
Pemanfaatan Jasa Lingkungan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman baru						
sosialisasi, promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam , kawasan pelestarian alam ,dan taman buru	50.000.000	50.000.000	100	0	0	0
Peningkatan pemanfaatan dan pemasaran lingkungan wisata alam dikawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru	60.000.000	60.000.000	100	0	0	0
Konservasi ekosistem dan pembinaanareal preservasi						
Fasilitasi pengembangan pengelolaan areal preservasi	300.000.000	300.000.000	100	118.715.000	118.715.000	100
Perencanaan konservasi Keanekaragaman hayati						

Optimalisasi tata kelola kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru	80.000.000	80.000.000	100	62.200.000	62.200.000	100
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Dan Taman Buru						
Penguatan Perencanaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru	475.000.000	475.000.000	100	113.310.000	113.310.000	100
Masyarakat yang di libatkan dalam kegiatan konservasi kawasn dan keanekaragaman hayati	95.000.000	95.000.000	100	5.710.000	5.710.000	100
Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat	75.000.000	75.000.000	100	44.520.000	44.520.000	100
Dukungan Manajemen						
Layanan Umum	750.000.000	750.000.000	100	225.000.000	225.000.000	100
Layanan Perkantoran	7.578.024.000	7.578.024.000	100	7.208.527.000	7.208.527.000	100
TOTAL	9.638.024.000	9.638.024.000	100	7.927.982.000	7.927.982.000	100

Sumber: BTNB 2025

Pada bulan Februari 2025, sebelum diterapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Pengelolaan APBN, Balai Taman Nasional Bunaken masih menjalankan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang mengakomodasi beragam program konservasi dan kegiatan pendukung lainnya secara luas. Alokasi anggaran pada bulan ini masih mencerminkan fleksibilitas belanja, di mana hampir seluruh kegiatan mendapatkan pendanaan dan direalisasikan

sepenuhnya, yakni sebesar 100 persen dari pagu anggaran. Kegiatan seperti “Pengembangan Bioprospeksi sumber daya genetik,” “Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar,” “Peningkatan pemanfaatan dan pemasaran lingkungan,” hingga “Optimalisasi tata kelola kerja sama penguatan kelembagaan” tetap dijalankan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode sebelum Inpres berlaku, pelaksanaan anggaran masih berorientasi pada pendekatan menyeluruh dan tidak sepenuhnya terfokus pada efektivitas serta prioritas output utama, sehingga program-program pendukung dan promosi masih dianggap relevan untuk didanai.

Namun, pada bulan April 2025, setelah Inpres No. 1 Tahun 2025 resmi diterapkan, terlihat adanya penyaringan dan pengurangan anggaran secara selektif terhadap kegiatan yang dianggap tidak langsung mendukung output prioritas. Hal ini tampak dari hilangnya alokasi anggaran untuk beberapa kegiatan yang sebelumnya aktif di bulan Februari, seperti “sosialisasi, promosi, dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan” serta “peningkatan pemanfaatan dan pemasaran lingkungan,” yang tidak lagi mendapatkan anggaran dan tidak dilanjutkan. Penghapusan kegiatan ini selaras dengan arahan Inpres yang menekankan efisiensi anggaran melalui penyederhanaan kegiatan, penghapusan belanja non-prioritas, dan optimalisasi kegiatan inti yang berdampak langsung pada kinerja organisasi. Sebaliknya, kegiatan yang tetap berjalan dan mendapatkan pendanaan pada bulan April merupakan kegiatan strategis yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi konservasi, seperti “Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar” dan “Fasilitasi pengembangan pengelolaan areal preservasi.” Kedua kegiatan ini tetap menunjukkan realisasi 100 persen, menandakan bahwa Balai Taman Nasional Bunaken berhasil mengarahkan sumber daya yang terbatas kepada program yang memiliki relevansi tinggi dengan konservasi biodiversitas serta penguatan kawasan lindung. Dengan demikian, perbandingan antara bulan Februari dan April 2025 mencerminkan perubahan pendekatan pengelolaan anggaran yang lebih selektif, efisien, dan berbasis pada outcome, sesuai amanat dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Secara keseluruhan, dampak dari penerapan Inpres No. 1 Tahun 2025 terhadap Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan bahwa Balai Taman Nasional Bunaken telah melaksanakan prinsip efisiensi secara substantif. Penghapusan kegiatan non-prioritas dan perampingan kegiatan inti telah berkontribusi pada peningkatan efektivitas penggunaan APBN. Realisasi anggaran tidak lagi bersifat menyebar, melainkan difokuskan pada kegiatan yang menghasilkan output yang nyata dan relevan dengan mandat pelestarian sumber daya alam. Hal ini juga menunjukkan peningkatan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, karena setiap alokasi yang direalisasikan memiliki keterkaitan langsung dengan indikator kinerja konservasi. Dengan demikian, Laporan Realisasi Anggaran setelah penerapan Instruksi Presiden mencerminkan tata kelola anggaran yang lebih baik, efisien, dan selaras dengan kebijakan nasional dalam mewujudkan birokrasi yang ramping namun produktif.

4.3 Pembahasan

Mengenai pelaksanaan dan dinamika realisasi anggaran Balai Taman Nasional Bunaken (BTNB) selama periode Januari hingga April tahun 2025. Informasi ini menjadi dasar penting untuk memahami konteks sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025. BTNB merupakan salah satu satuan kerja di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki mandat utama dalam pengelolaan kawasan konservasi laut dan darat di Sulawesi Utara. Kawasan ini memiliki nilai ekologis yang tinggi, baik sebagai habitat alami bagi beragam spesies laut maupun sebagai pusat edukasi dan ekowisata. Dalam menjalankan mandat konservasi tersebut, BTNB memerlukan dukungan anggaran yang signifikan untuk membiayai berbagai program seperti konservasi spesies dan ekosistem, pemantauan kawasan, pemberdayaan masyarakat, hingga operasional manajemen kantor. Data realisasi anggaran tahun 2025 menunjukkan dinamika pelaksanaan program yang mencerminkan perubahan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran.

Pada bulan Januari dan Februari 2025, pelaksanaan anggaran masih mengacu pada pendekatan administratif tradisional, dengan cakupan kegiatan yang luas dan belum terfokus. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup promosi wisata, pengembangan bioprospeksi, serta berbagai program konservasi tanpa seleksi berbasis prioritas atau urgensi. Namun, mulai bulan Maret 2025, BTNB mulai menerapkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 secara bertahap, yang mendorong penghapusan kegiatan non-esensial serta pemangkasan anggaran pada program-program yang tidak mendukung output utama. Perubahan ini disertai dengan evaluasi internal terhadap efektivitas kegiatan yang selama ini berjalan, sehingga strategi penganggaran tidak lagi hanya berdasarkan ketersediaan dana, tetapi diarahkan pada kegiatan dengan dampak nyata terhadap fungsi konservasi. Hasilnya, pada bulan April 2025 terjadi efisiensi sebesar 17,7% dibanding bulan Februari, tetapi dengan capaian output tetap 100%. Efisiensi ini dicapai tanpa menurunkan target fisik maupun kualitas kegiatan yang dijalankan. Perubahan pola ini menjadi indikasi awal bahwa pendekatan baru berbasis efisiensi mampu menjaga kinerja organisasi sekaligus menghemat pengeluaran negara.

4.3.1 Penerapan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 di BTNB

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengamanatkan efisiensi pengelolaan APBN dengan menitikberatkan pada tiga prinsip utama: (1) penghentian kegiatan non-prioritas, (2) penguatan fokus terhadap program strategis, dan (3) efisiensi teknis dan ekonomis dalam pelaksanaan program. Kebijakan ini hadir sebagai jawaban atas tantangan keterbatasan fiskal negara dan kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas birokrasi pemerintahan. Dalam konteks BTNB, penerapan Inpres ini direalisasikan melalui serangkaian penyesuaian, antara lain: - Penghapusan kegiatan promosi dan pemasaran jasa lingkungan wisata alam yang tidak memberikan kontribusi langsung terhadap indikator kinerja konservasi. Langkah ini diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan tersebut yang dinilai tidak menghasilkan dampak signifikan terhadap perlindungan sumber daya alam. Rasionalisasi anggaran pada program konservasi, seperti pengurangan dana pengelolaan ekosistem dari Rp300 juta menjadi Rp118 juta, tanpa

mengurangi luas wilayah pengelolaan atau intensitas kegiatan lapangan. Pemangkasan dana pada kegiatan dokumen perencanaan dari Rp475 juta menjadi Rp113 juta, dengan tetap menghasilkan satu dokumen strategi yang dibutuhkan untuk penguatan fungsi kawasan. Selain itu, BTNB juga melakukan efisiensi dalam layanan pendukung seperti layanan umum dan layanan perkantoran, dengan tetap memastikan kualitas pelayanan kepada internal organisasi. Tim pengelola keuangan dan perencana kegiatan melakukan penyusunan ulang struktur anggaran berbasis pada analisis cost-benefit dan relevansi terhadap tujuan konservasi. Langkah-langkah tersebut memperlihatkan bentuk implementasi konkret dari efisiensi anggaran, yang tidak sekadar memotong dana, melainkan menata ulang prioritas pembiayaan dengan mempertimbangkan relevansi, efektivitas, dan keterkaitannya dengan output utama konservasi. Pendekatan ini juga menunjukkan kemampuan adaptasi BTNB dalam mengikuti arah kebijakan nasional tanpa mengganggu pelaksanaan program strategis yang telah direncanakan.

Temuan empiris penelitian ini sangat relevan dengan kerangka berpikir yang telah disusun sebelumnya. Permasalahan utama berupa tingginya kebutuhan anggaran dan rendahnya pendapatan wisata disikapi dengan kebijakan efisiensi anggaran melalui Inpres No. 1 Tahun 2025. Fokus penelitian diarahkan pada strategi pelaksanaan efisiensi dan implementasi kebijakan di tingkat satuan kerja. Dari sisi teori, hasil penelitian ini sejalan dengan: **Teori Efisiensi Anggaran**, yang mencakup Efisiensi teknis yang mana Output tetap tercapai meskipun input (anggaran) berkurang, Efisiensi ekonomis yang mana Biaya lebih rendah digunakan untuk mencapai hasil yang sama, dan juga Efisiensi alokatif yang mana anggaran diarahkan kepada kegiatan yang memberikan dampak paling signifikan. **Teori Akuntansi Pemerintahan**, yang menekankan prinsip *value for money*, transparansi, dan akuntabilitas publik. Hal ini tercermin dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BTNB yang mengaitkan setiap pengeluaran langsung dengan capaian output. Teori ini juga mendukung perlunya pelaporan anggaran yang berbasis kinerja. **Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam**, yang menegaskan pentingnya keberlanjutan dan efisiensi dalam pengelolaan kawasan

konservasi, termasuk partisipasi masyarakat lokal. Efisiensi tidak boleh mengorbankan tujuan utama pelestarian lingkungan, dan dalam konteks BTNB, hal ini telah tercapai dengan tetap melibatkan kelompok masyarakat dan mempertahankan kualitas konservasi. Integrasi antara hasil penelitian dan kerangka teori ini menegaskan validitas pendekatan yang dilakukan BTNB serta relevansi kebijakan efisiensi APBN dalam praktik konservasi.

Penerapan efisiensi anggaran di BTNB tidak hanya menghasilkan penghematan fiskal, tetapi juga mengindikasikan perbaikan sistem tata kelola organisasi. Program-program konservasi tetap berjalan optimal dengan output maksimal, sementara pemborosan anggaran yang selama ini tersebar pada kegiatan non-prioritas dapat ditekan secara sistematis. Hal ini menegaskan bahwa efisiensi bukanlah sekadar pemotongan anggaran, melainkan sebuah proses manajerial yang menyusun ulang skala prioritas berdasarkan urgensi, relevansi, dan kontribusinya terhadap capaian institusional. Implikasi yang lebih luas adalah adanya peluang bagi BTNB untuk menjadi model nasional dalam penerapan efisiensi anggaran berbasis hasil. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa instansi pemerintah mampu beradaptasi dengan arahan kebijakan pusat tanpa kehilangan kualitas layanan publik. Pendekatan berbasis kinerja dan hasil seperti ini juga dapat diadopsi oleh satuan kerja lain, terutama di sektor kehutanan, perikanan, dan lingkungan hidup. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi satuan kerja pemerintah lainnya, khususnya dalam pengelolaan kawasan konservasi, untuk menerapkan efisiensi berbasis *outcome*. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perumusan kebijakan yang lebih adaptif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menyusun program anggaran tahunan yang berbasis pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, BTNB dapat menjadi model penerapan kebijakan efisiensi anggaran yang berhasil menyeimbangkan tuntutan pelestarian lingkungan dengan keterbatasan fiskal, sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam secara nasional.

4.3.2 Dampak Efisiensi pada Optimalisasi APBN, Efektivitas Program Konservasi, dan Peningkatan Akuntabilitas

Implementasi strategi efisiensi di BTNB, sebagai respons langsung terhadap Inpres No. 1 Tahun 2025, telah menghasilkan dampak yang jelas dan terukur:

1. Optimalisasi Penggunaan APBN

Efisiensi yang dicapai oleh BTNB secara langsung berkontribusi pada optimalisasi penggunaan APBN. Data menunjukkan pemangkasan anggaran yang signifikan di berbagai program, yang berarti terjadi penghematan dana publik. Misalnya, penghematan pada Program Pengelolaan Kawasan saja mencapai Rp 119.770.000, dan pada program Dukungan Manajemen mencapai Rp 894.497.000. Angka-angka ini secara konkret merepresentasikan dana APBN yang kini dapat dialokasikan secara lebih strategis oleh pemerintah, baik untuk program prioritas lain di sektor konservasi maupun di sektor pembangunan nasional lainnya. Ini adalah bukti nyata bahwa BTNB telah menjalankan mandat Inpres untuk pengelolaan fiskal yang lebih bertanggung jawab dan efisien.

2. Efektivitas Program Konservasi

Meskipun terjadi pemangkasan anggaran yang besar, efektivitas program konservasi secara umum tetap terjaga atau bahkan ditingkatkan dalam fokusnya. Ini terbukti dari konsistensi target *output* dan realisasi di banyak program meskipun anggaran berkurang seperti;

- a. Pada program Konservasi Spesies dan Genetik, kegiatan penyelamatan tetap dilakukan di 5 lokasi.
- b. Pada program Konservasi Ekosistem, luas wilayah pengelolaan 0,02 hektar tetap dipertahankan.
- c. Pada program Perencanaan Konservasi, jumlah dokumen yang dihasilkan tetap 1.
- d. Pada program Pengelolaan Kawasan, jumlah orang atau kelompok yang terlibat tetap sesuai target.

Keputusan untuk menghapus kegiatan yang "tidak berdampak langsung" (misalnya pada Program Pemanfaatan Jasa Lingkungan) menunjukkan bahwa BTNB melakukan penajaman prioritas. Sumber daya yang terbatas kini difokuskan pada kegiatan yang secara langsung berkontribusi pada kinerja utama konservasi, memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengorbankan esensi dan dampak inti dari upaya pelestarian. Hal ini mengindikasikan bahwa BTNB telah menemukan cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan mandat konservasinya dengan sumber daya yang lebih hemat.

3. Peningkatan Akuntabilitas

Penerapan Inpres No. 1 Tahun 2025 secara langsung meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran BTNB. Data yang disajikan secara rinci mengenai anggaran dan realisasi, serta perbandingan antara bulan Februari 2025 sebelum terjadinya efisiensi dan Maret 2025 setelah terjadinya efisiensi, merupakan indikator konkret dari peningkatan transparansi. BTNB dituntut untuk secara jelas menunjukkan bagaimana dana publik digunakan dan bagaimana setiap rupiah berkorelasi dengan pencapaian target. Proses identifikasi dan implementasi efisiensi ini memerlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang ketat. Ketersediaan data yang membandingkan "sebelum" dan "sesudah" penerapan Inpres memfasilitasi audit kinerja dan keuangan yang lebih mudah, sehingga memastikan bahwa pengelola dana bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan alokasi. Peningkatan akuntabilitas ini memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya oleh lembaga pemerintah.

BAB V

Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data riil yang disajikan, Balai Taman Nasional Bunaken telah berhasil mengimplementasikan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dengan menunjukkan efisiensi yang nyata dan terukur di seluruh programnya. Strategi yang diterapkan mencakup rasionalisasi program melalui penghapusan kegiatan non-esensial, penajaman fokus pada kegiatan inti, dan optimalisasi biaya operasional dan administratif tanpa mengorbankan target *output* utama.

Penerapan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 telah mendorong Balai Taman Nasional Bunaken (BTNB) untuk mencapai efisiensi signifikan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui berbagai strategi penajaman fokus program dan efisiensi operasional, peningkatan fokus dan realokasi anggaran ke program prioritas tinggi (misalnya penyelamatan spesies), optimalisasi metode kerja dan sumber daya lokal dalam pelaksanaan kegiatan (terlihat pada konservasi ekosistem dan pengelolaan kawasan), serta penekanan biaya operasional dan administrasi. Dampak dari efisiensi ini sangat positif dan terukur: optimalisasi APBN melalui penghematan dana yang signifikan, efektivitas program konservasi yang tetap terjaga atau bahkan meningkat karena penajaman fokus pada *output* inti meskipun dengan anggaran lebih rendah, dan peningkatan akuntabilitas lembaga melalui transparansi data anggaran dan realisasi yang lebih ketat, memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya.

5.2 Rekomendasi

Supaya keberhasilan BTNB ini bisa terus berlanjut dan bahkan ditiru pihak lain, ada beberapa hal yang bisa direkomendasikan:

1. Untuk Faktor-faktor Efisiensi

- a. **Catat Cara Kerja Hemat yang Berhasil:** BTNB perlu mendokumentasikan setiap strategi penghematan yang sukses mereka lakukan, misalnya bagaimana mereka melatih staf internal sendiri alih-alih mengundang ahli mahal dari luar, atau bagaimana mereka memanfaatkan peralatan yang sudah ada. Ini penting

agar cara-cara efisien ini bisa menjadi panduan atau standar bagi program lain di BTNB atau bahkan bagi balai taman nasional lain.

- b. Cek Terus Program yang Dihapus:** Walaupun beberapa kegiatan dihapus karena dianggap tidak penting, BTNB disarankan untuk sesekali meninjau ulang apakah kegiatan tersebut benar-benar tidak akan relevan di masa depan. Mungkin ada cara yang lebih efisien untuk menjalankannya jika nanti relevansinya berubah, atau apakah penghapusan ini tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang.
- c. Tingkatkan Kemampuan Staf Internal:** Dengan terus melatih dan mengembangkan keahlian staf BTNB sendiri dalam perencanaan dan pelaksanaan program, mereka akan makin mandiri dan tidak perlu bergantung pada konsultan eksternal yang biayanya seringkali mahal. Ini akan semakin mendukung penghematan anggaran.

2. Untuk Dampak Efisiensi

- a. Ukur Dampak Program yang Tidak Cuma Angka:** Selain menghitung berapa orang yang terlibat atau berapa lokasi yang dipantau, BTNB perlu mencari cara untuk mengukur dampak yang lebih dalam dan tidak hanya berupa angka. Misalnya, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat meningkat setelah terlibat program, atau seberapa sehat ekosistem laut mereka secara kualitatif. Ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang keberhasilan konservasi.
- b. Menjadi contoh bagi instansi lain :** Keberhasilan BTNB dalam berhemat sambil tetap efektif patut jadi contoh. Mereka bisa berbagi pengalaman dan strategi efisiensinya kepada balai taman nasional lain atau lembaga konservasi di Indonesia. Ini bisa dilakukan lewat lokakarya atau seminar agar semakin banyak yang bisa mengelola dana negara dengan lebih baik.
- c. Buat Rencana Anggaran Jangka Panjang yang Kuat:** Dengan data efisiensi yang sudah ada, BTNB bisa membuat proposal anggaran untuk masa depan yang lebih meyakinkan. Mereka bisa menunjukkan bagaimana setiap rupiah yang diterima akan menghasilkan dampak konservasi yang optimal. Ini juga bisa membuka peluang untuk mencari sumber dana tambahan dari pihak swasta atau organisasi non-profit yang tertarik mendukung konservasi yang efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Alimuddin, Firman, and Hasanudin Damis, 'Analisis Efektifitas Dan Efisiensi

- Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang', *PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1.1 (2018), pp.
- Aziz, A., & Zakir, S. (2022). *Indonesian Research Journal on Education : Jurnal Ilmu Pendidikan*. 2(3), 1030–1037.
- Efisiensi, M., & Negara, K. (2024). *Implementasi Akuntansi Pemerintah pada Instansi Pemerintah dalam Implementasi Akuntansi Pemerintah pada Instansi Pemerintah dalam Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas Keuangan Negara*. November.
- Indonesia, kementerian sekretariat negara. (2025). Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025. *Inpres No. 1 tahun 2025*, 19, 1–1. <https://doi.org/10.1145/1400885.1400974>
- Isnaeni Lukman, E., Tri Utomo, A., Renova Sinaga, I., Taman Nasional Bunaken, B., Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Utara Indonesia, K., & Korespondensi Ermas Isnaeni Lukman BTN, P. (2022). Pendidikan Konservasi Berbasis Teknologi kepada Masyarakat Pulau Nain, Kawasan Taman Nasional Bunaken. *Pengabdian Multidisiplin*, 4(2), 70–76.
- Kota, A., & Suryati, A. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Aliansi : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 18(2), 11–18. <https://doi.org/10.46975/aliansi.v18i2.536>
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), 1–10.
- Sonia, T., Karyani, T., & Susanto, A. (2020). Analisis Efisiensi Alokatif Usahatani Cabai Merah Besar Di Desa Sukalaksana Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 6(1), 19. <https://doi.org/10.25157/ma.v6i1.2613>
- Wahyudi, M. I., Ananda, M. R., & Brezki, S. D. (2024). *Analisis Transparansi , Efisiensi , dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Analisis Transparansi , Efisiensi*

- , dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kantor Gubernur Sumatera Barat. *June*, 0–11.
- Wahyuni, S., & Hernusa, H. L. (2021). Tinjauan Proses Penyusunan Anggaran Belanja Pada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 1(2), 219–230. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v1i2.1338>
- Windyatama, A., Nasution, M., & Hanafi Purba, N. (2024). Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 863–868. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2820>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Wawancara

Jabatan	Pertanyaan	Jawaban
Kasubag	1. Bagaimana Penerapan instruksi presiden no. 1 tahun 2025 pada Balai Taman nasional bunaken? 2. Apakah dampak yang terjadi di Balai Taman Nasional Bunaken setelah diterapkan Inpres tersebut	1. Instruksi Presiden di BTNB mulai diterapkan dibulan maret yang mana kami mendiskusikan hal-hal yang penting kami pertahankan dan tanpa mengorbankan karyawan yang ada, tetapi beberapa program yang membawa dampak langsung bagi Balai Taman Nasional Bunaken tetap kami pertahankan. 2. Seperti yang di ketahui inpres mulai diedarkan dari bulan januari dan lebih menyangkut ke belanja operasional yang mana orang berpikir hanya ATK,biaya spanduk dll,tetapi sebenarnya tidak hanya itu melainkan mencakup seluruh biaya pemeliharaan aset dan belanja langganan daya dan jasa , dan saya mengambil kebijakan untuk memangkas setengah dari biaya pemeliharaan aset termasuk BBM pimpinan. Gaji Honorer juga termasuk dalam belanja barang operasional tetapi saya meprioritaskan karyawan sehingga tidak terkorek gajinya, dan juga adanya Anggaran Biaya Tambahan dari pusat khusus hanya di patroli saja untuk membantu karyawan.

Lampiran 2: RKA dan DIPA bulan januari 2025

BAGIAN-A

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEMEN/LEMB : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
UNIT ORG : (04) DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
SATUAN KERJA : (693632) BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN
PROPINSI : (17) SULAWESI UTARA
LOKASI : (51) KOTA MANADO

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2025			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
143.04.WA	Program Dukungan Manajemen		7,433,527,000		7,433,527,000
01	Sasaran Program : Meningkatkan kinerja pelayanan brokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien				
7315	Indikator Kinerja Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem		7,433,527,000		7,433,527,000
7315.EBA	Indikator Kinerja Kegiatan : Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya 01 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Konservasi Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 17.51 KOTA MANADO	2.00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	7,433,527,000		7,433,527,000
982	Indikator RO Layanan Umum	1.00 Layanan	225,000,000		225,000,000
01	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal				
994	Layanan Perkantoran	1.00 Layanan	7,208,527,000		7,208,527,000
01	Indikator RO Jumlah layanan operasional perkantoran				

144.497.000 b6kr

Belanja modal

MANADO, 30 Januari 2025

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 143.04.2.693632/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS 5030-5686-1251-9732

Kementerian Negara/Lembaga : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode Nama Satker : (693632) BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II, 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARBIKAN REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693632	BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN	5.244.497	2.333.527	-	-	-	7.578.024		
143.04.WA	Program Dukungan Manajemen	5.244.497	2.333.527	-	-	-	7.578.024		
7315	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	5.244.497	2.333.527	-	-	-	7.578.024		
7315.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	5.244.497	2.333.527	-	-	-	7.578.024	17.51	
01	RM	5.244.497	2.333.527	-	-	-	7.578.024	049	
JUMLAH		5.244.497	2.333.527	-	-	-	7.578.024		

Jakarta, 02 Desember 2024
 Menteri Kehutanan

 tsd.
 Raja Juli Antoni, Ph.D

BAGIAN-A

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KNERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEMENLEMB : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
UNIT ORG : (64) DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
SATUAN KERJA : (603632) BALAI TAMAN NASIONAL BUKITEN
PROPOSISI : (17) SULAWESI UTARA
LOKASI : (51) KOTA MANADO

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KNERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KNERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2025			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INSIYATI BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	01 Jumlah dokumen visi buku tahunan Data dan Informasi Publik [Basa Ling] 17.31 KOTA MANADO Indikator KRO	1,00 dokumen, Peta, Data	475,000,000		475,000,000
7273.084	000 Penggiatan Konservasi Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) indikator RO	5,00 dokumen	475,000,000		475,000,000
	01 Jumlah Kawasan yang terakutis dokumen perencanaan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru		791,000,000		791,000,000
7273	Indikator Kinerja Kelengkapan :				
	01 Penurunan Rata-rata Insidensi di KSA, KPA, dan TB				
	02 Jumlah Unit Konservasi Suaka Alam (KSA), dan Kawasan Suaka Alam				
	03 Luas Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di KSA, KPA, dan				
	04 Peningkatan Jalur/Jalan Patrol Perindungan dan				
	01 Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan				
	02 Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberi Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat [Basa Ling] 17.31 KOTA MANADO	6,00 Orang	95,000,000		95,000,000
7273.000	Indikator KRO				
	Masyarakat yang diberikan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Kelestariannya Habitat	6,00 Orang	95,000,000		95,000,000
001	Jumlah Masyarakat yang diberikan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Kelestariannya Habitat				
	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat [Basa Ling] 17.31 KOTA MANADO	3,00 Kelompok Masyarakat	75,000,000		75,000,000
7273.001	Indikator KRO				
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	3,00 Kelompok Masyarakat	75,000,000		75,000,000
001	Jumlah kelompok masyarakat yang diberi Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat [Basa Ling] 17.31 KOTA MANADO	6,216.00 Indukster, Paket, Indikator	621,000,000		621,000,000
7273.001	Indikator KRO				
	Penggiatan Partisipasi dan Pengembangan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru	6,216.00 Indikator	621,000,000		621,000,000
001	Jalur/Jalan Patrol Perindungan dan Pengembangan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru [TB]				

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAGIAN-A

KEMENLEMB : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
UNIT ORG : (04) DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
SATUAN KERJA : (089332) BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKAN
PROPOSISI : (17) SULAWESI UTARA
LOKASI : (51) KOTA MANADO

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/INDO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2025			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DABAR	INSIYATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
143.94.96A	Program Dukungan Manajemen		8,328,624,000		8,328,624,000
	SASARAN PROGRAM :				
01	Meningkatkan kinerja pelayanan internal Kementerian Kehutanan yang agila, efektif, dan efisien				
	Indikator Kinerja Program :				
7315	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem		8,328,624,000		8,328,624,000
	Indikator Kinerja Kegiatan :				
01	Nilai SAPK pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya				
	(Level Manutara SMP) Direktorat Jenderal Konservasi				
7315.02A	Layanan Dukungan Managemen Internal (Bisa Ulang) 13.51 KOTA MANADO	3.65 Layanan, Laporan, Dokumen, Bukatan/bukti, Unit	8,328,624,000		8,328,624,000
	Indikator ORG				
062	Layanan Simtom	1.00 Layanan	750,000,000		750,000,000
	Indikator IO				
064	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal				
	Layanan Perencanaan	1.00 Layanan	7,578,624,000		7,578,624,000
	Indikator IO				
01	Jumlah layanan operasional pemerintahan				

MANADO, 12 Februari 2025

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 143.04.2.693632/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DR. 5329-0004-0002-2024

Kementerian Negara/Lembaga : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (693632) BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN
Kawasan/Kategori : (KD)

Halaman : II. 1
(Dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENYERAPAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH [5]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693632	BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN	5.244.497	4.970.527	134.000	-	-	10.349.024		
143.04.FP	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	-	1.508.000	113.000	-	-	2.021.000		
7269	Konservasi Spesies dan Genetik	-	265.000	-	-	-	265.000		
7269.QMA	Data dan Informasi Publik (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	90.000	-	-	-	90.000	17.51	
04 PNPB		-	90.000	-	-	-	90.000	049	
7269.REB	Konservasi Jenis/Spesies (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	175.000	-	-	-	175.000	17.51	
01 RM		-	75.000	-	-	-	75.000	049	
04 PNPB		-	100.000	-	-	-	100.000	049	
7270	Pemertanian Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru	-	110.000	-	-	-	110.000		
7270.PEP	Sosialisasi dan Diseminasi (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	50.000	-	-	-	50.000	17.51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 143.04.2.693632/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DR. 5329-0004-0002-2024

Kementerian Negara/Lembaga : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (693632) BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN
Kawasan/Kategori : (KD)

Halaman : II. 2
(Dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENYERAPAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH [5]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNPB		-	50.000	-	-	-	50.000	049	
7270.QMA	Pelayanan Publik Lainnya (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	60.000	-	-	-	60.000	17.51	
01 RM		-	57.100	-	-	-	57.100	049	
04 PNPB		-	2.900	-	-	-	2.900	049	
7271	Konservasi Ekosistem dan Pembiinan Areal Preservasi	-	192.000	108.000	-	-	300.000		
7271.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	192.000	108.000	-	-	300.000	17.51	
01 RM		-	192.000	108.000	-	-	300.000	049	
04 PNPB		-	192.000	-	-	-	192.000	049	
7272	Pemertanian Konservasi Kesejahteraan Hayati	-	80.000	-	-	-	80.000		
7272.PEC	Korja sams (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	80.000	-	-	-	80.000	17.51	
04 PNPB		-	80.000	-	-	-	80.000	049	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 143.04.2.693632/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DR. 5329-0004-0002-2024

Kementerian Negara/Lembaga : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (693632) BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN
Kawasan/Kategori : (KD)

Halaman : II. 3
(Dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENYERAPAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH [5]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7272.QMA	Data dan Informasi Publik (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	475.000	-	-	-	475.000	17.51	
04 PNPB		-	475.000	-	-	-	475.000	049	
7273	Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru	-	788.000	5.000	-	-	793.000		
7273.QDC	Facilitas dan Pembinaan Masyarakat (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	95.000	-	-	-	95.000	17.51	
04 PNPB		-	95.000	-	-	-	95.000	049	
7273.QDD	Facilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	75.000	-	-	-	75.000	17.51	
04 PNPB		-	75.000	-	-	-	75.000	049	
7273.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	616.000	5.000	-	-	621.000	17.51	
04 PNPB		-	616.000	5.000	-	-	621.000	049	
143.04.WA	Program Dukungan Manajemen	5.244.497	3.062.527	21.000	-	-	8.328.024		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 143.04.2.693632/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DR. 5329-0004-0002-2024

Kementerian Negara/Lembaga : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode/Nama Satker : (693632) BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN
Kawasan/Kategori : (KD)

Halaman : II. 4
(Dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENYERAPAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH [5]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7310	Bantuan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	5.244.497	3.062.527	21.000	-	-	8.328.024		
7310.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	5.244.497	3.062.527	21.000	-	-	8.328.024	17.51	
01 RM		5.244.497	3.062.527	21.000	-	-	8.328.024	049	
04 PNPB		-	130.100	-	-	-	130.100	049	
JUMLAH		5.244.497	4.970.527	134.000	-	-	10.349.024		

Jakarta, 02 Desember 2024

Menteri Kehutanan

Reza Juliantoro, Ph.D.

Lampiran 4: RKA-KL dan DIPA bulan Maret 2025

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025						BAGIAN-A	
KEMEN/LEMB : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN UNIT ORG : (04) DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM SATUAN KERJA : (693632) BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN PROPINSI : (17) SULAWESI UTARA LOKASI : (51) KOTA MANADO						Halaman : 1	
KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2025					
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INSIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
143.04.FP	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		2,694,686,000		2,694,686,000		
01	Sasaran Program.1						
	Meningkatkan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya						
	Indikator Kinerja Kegiatan.1						
	Jumlah Unit KSA, KPA, dan TB Dengan Kategori Pengelolaan Ekstrem						
	04.01						
	Luas ekosistem terduga yang diukuhkan						
	04.02						
	Jumlah Individu Penyelamatan TSB, Tumbuhan dan Satwa (Ist)						
	04.03						
	Jumlah Spesies yang terasessment secara nasional status terancamannya berdasarkan IUCN redlist						
	04.04						
	Luas KSA, KPA, TB dan Areal Preservasi						
	04.05						
	Meningkatkan nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan						
	Indikator Kinerja Program.1						
	Nilai ekspor tumbuhan, satwa liar, dan bioprospecting						
	07.01						
	Meningkatkan pemanfaatan, pengemasan, dan pengelolaan kawasan hutan						
	Indikator Kinerja Program.1						
	Nilai PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan						
	08.01						
	Nilai PNBP dari pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar berkelanjutan						
	08.02						
	Peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok terni hutan						
	12						
	Indikator Kinerja Program.1						
	Nilai transaksi ekonomi kelompok pembudidayaan masyarakat kawasan konservasi						
	12.01						
	Indikator Kinerja Kegiatan.1						
	Konservasi Spesies dan Genetik		240,000,000		240,000,000		
7269	Indikator Kinerja Kegiatan.1						
7269.08A	Data dan Informasi Publik (Base Line) 17.51 KOTA MANADO	1.00 dokumen, Foto, Data	90,000,000		90,000,000		
	Indikator KRO						
	001	Pengisian Data dan Informasi Kelembagaan Hayati	1.00 Data	90,000,000	90,000,000		
	Indikator RO						
	01	Jumlah Data dan Informasi Kelembagaan Hayati					
	7269.08B	Konservasi Jenis/Spesies (Base Line) 17.51 KOTA MANADO	5.00 Spesies, Lokal	150,000,000	150,000,000		
	Indikator KRO						
	001	Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	5.00 Lokal	150,000,000	150,000,000		
	Indikator RO						
	01	Jumlah Lokal Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar					
	7271	Konservasi Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi		118,715,000	118,715,000		
	Indikator Kinerja Kegiatan.1						
	Konservasi Kawasan Rehabilitasi Ekosistem (Base Line) 17.51 KOTA MANADO	50 Hektar	118,715,000		118,715,000		
7271.06A	Indikator KRO						
001	Penilaian Pengembangan Pengelolaan Areal Preservasi	60 Hektar	118,715,000		118,715,000		

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025						BAGIAN-A	
KEMEN/LEMB : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN UNIT ORG : (04) DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM SATUAN KERJA : (693632) BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN PROPINSI : (17) SULAWESI UTARA LOKASI : (51) KOTA MANADO						Halaman : 2	
KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2025					
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INSIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
01	Luas areal preservasi yang dikelola pengelolaan						
7272	Perencanaan Konservasi Kelembagaan Hayati		175,510,000		175,510,000		
7272.08C	Indikator Kinerja Kegiatan.1						
	Kerja sama (Base Line) 17.51 KOTA MANADO	1.00 Kelembagaan, Hektar, Orang, Satuan Milen, Milyar, Dokumen, Kilo Liter	62,200,000		62,200,000		
	Indikator KRO						
	001	Optimalisasi tata letak kerja sama pengelolaan fungsi dan pembangunan strategi di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	1.00 Dokumen	62,200,000	62,200,000		
	Indikator RO						
	01	Jumlah dokumen tata letak kerjasama					
	7272.08D	Data dan Informasi Publik (Base Line) 17.51 KOTA MANADO	1.00 dokumen, Foto, Data	113,310,000	113,310,000		
	Indikator KRO						
	001	Pengisian Perencanaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	1.00 dokumen	113,310,000	113,310,000		
	Indikator RO						
	01	Jumlah Kawasan yang terasessment secara nasional status terancamannya					
	7273	Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru		2,162,461,000	2,162,461,000		
7273.02D	Indikator Kinerja Kegiatan.1						
	Facilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Base Line) 17.51 KOTA MANADO	6.00 Orang	5,710,000		5,710,000		
	Indikator KRO						
	001	Masyarakat yang diberikan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Kelembagaan Hayati	6.00 Orang	5,710,000	5,710,000		
	Indikator RO						
	01	Jumlah Masyarakat yang diberikan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Kelembagaan Hayati					
	7273.02D	Facilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Base Line) 17.51 KOTA MANADO	3.00 Kelompok Masyarakat	44,820,000	44,820,000		
	Indikator KRO						
	001	Pembinaan dan Pembudayaan Kelompok Masyarakat	3.00 Kelompok Masyarakat	44,820,000	44,820,000		
	Indikator RO						
	01	Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan					
	7273.02E	Konservasi Kawasan Rehabilitasi Ekosistem (Base Line) 17.51 KOTA MANADO	21,792.00 Hektar, Lokal	2,113,231,000	2,113,231,000		
7273.02E	Indikator KRO						
	001	Peningkatan Perlebangan dan Penguasaan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	21,792.00 Hektar	2,113,231,000	2,113,231,000		
	Indikator RO						
	01	Jumlah Perlebangan Perlebangan dan Penguasaan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)					

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025						BAGIAN-A	
KEMEN/LEMB : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN UNIT ORG : (04) DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM SATUAN KERJA : (693632) BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN PROPINSI : (17) SULAWESI UTARA LOKASI : (51) KOTA MANADO						Halaman : 3	
KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2025					
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INSIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
143.04.WA	Program Dukungan Manajemen		7,433,527,000		7,433,527,000		
01	Sasaran Program.1						
	Meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif, dan efisien						
	Indikator Kinerja Program.1						
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Diagen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem						
	Indikator Kinerja Kegiatan.1						
	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Base Line) 17.51 KOTA MANADO	2.00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	7,433,527,000		7,433,527,000		
	Indikator KRO						
	962	Layanan Umum	1.00 Layanan	225,000,000	225,000,000		
	Indikator RO						
	01	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal					
	994	Layanan Perkantoran	1.00 Layanan	7,208,527,000	7,208,527,000		
	Indikator RO						
	01	Jumlah layanan operasional perkantoran					

MANADO, 10 April 2025

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 143.04.2.693632/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



05 9072-7239-6554-6536

Kementerian Negara/Lembaga : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
 Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
 Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
 Kode/Nama Satker : (693632) BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN
 Kewenangan : (KD)

Halaman : 8. 1
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENYARFAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693632	BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN	5.559.000	4.550.213	21.000	-	-	10.130.213		
143.04.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	-	2.696.686	-	-	-	2.696.686		
7268	Konservasi Spesies dan Genetik	-	240.000	-	-	-	240.000		
7269.QMA	Data dan Informasi Publik	-	90.000	-	-	-	90.000	17. 51	
	(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	-	-	-	-	-		
04 PNPB		-	90.000	-	-	-	90.000	049	
7269.REB	Konservasi Jenis/Spesies	-	150.000	-	-	-	150.000	17. 51	
	(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	-	-	-	-	-		
04 PNPB		-	150.000	-	-	-	150.000	049	
7271	Konservasi Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi	-	118.715	-	-	-	118.715		
7271.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	-	118.715	-	-	-	118.715	17. 51	
	(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	-	-	-	-	-		
04 PNPB		-	118.715	-	-	-	118.715	049	
7272	Pelaksanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	-	175.510	-	-	-	175.510		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 143.04.2.693632/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



05 9072-7239-6554-6536

Kementerian Negara/Lembaga : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
 Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
 Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
 Kode/Nama Satker : (693632) BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN
 Kewenangan : (KD)

Halaman : 8. 2
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENYARFAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7272.PEC	Kerja sama	-	62.200	-	-	-	62.200	17. 51	
	(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	-	-	-	-	-		
04 PNPB		-	62.200	-	-	-	62.200	049	
7272.QMA	Data dan Informasi Publik	-	113.310	-	-	-	113.310	17. 51	
	(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	-	-	-	-	-		
04 PNPB		-	113.310	-	-	-	113.310	049	
7273	Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru	-	2.162.481	-	-	-	2.162.481		
7273.QDC	Facilitasi dan Pembinaan Masyarakat	-	5.710	-	-	-	5.710	17. 51	
	(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	-	-	-	-	-		
04 PNPB		-	5.710	-	-	-	5.710	049	
7273.QDD	Facilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	-	44.520	-	-	-	44.520	17. 51	
	(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	-	-	-	-	-		
04 PNPB		-	44.520	-	-	-	44.520	049	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 143.04.2.693632/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



05 9072-7239-6554-6536

Kementerian Negara/Lembaga : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
 Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
 Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
 Kode/Nama Satker : (693632) BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN
 Kewenangan : (KD)

Halaman : 8. 3
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENYARFAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7273.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	-	3.112.231	-	-	-	3.112.231	17. 51	
	(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	-	-	-	-	-		
01 RM		-	749.150	-	-	-	749.150	049	
04 PNPB		-	1.363.081	-	-	-	1.363.081	049	
143.04.WA	Program Dukungan Manajemen	5.559.000	1.853.527	21.000	-	-	7.433.527		
7314	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	5.559.000	1.853.527	21.000	-	-	7.433.527		
7315.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.559.000	1.853.527	21.000	-	-	7.433.527	17. 51	
	(17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	-	-	-	-	-		
01 RM		5.559.000	1.853.527	21.000	-	-	7.433.527	049	
JUMLAH		5.559.000	4.550.213	21.000	-	-	10.130.213		

Jakarta, 02 Desember 2024
 Menjabat Kehutanan

Dr.
 Raja Juli Antoni, Ph.D.

Lampiran 5: RKA-KL dan DIPA bulan April 2025

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025						RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025					
KEMENLEMB : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN UNIT ORG : (04) DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM SATUAN KERJA : (693632) BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN PROPOSISI : (17) SULAWESI UTARA LOKASI : (51) KOTA MANADO						KEMENLEMB : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN UNIT ORG : (04) DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM SATUAN KERJA : (693632) BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN PROPOSISI : (17) SULAWESI UTARA LOKASI : (51) KOTA MANADO					
Halaman : 1						Halaman : 2					
KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISITATIF BARU	JUMLAH	KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISITATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
143.04.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		2,696,000,000		2,696,000,000		Indikator Kinerja Kegiatan:				
04	Sasaran Program:					01	Luas ekosistem yang dipulihkan				
04.01	Indikator Kinerja Program:					01	Luas Area Preservasi yang dikembangkan				
04.02	Jumlah Unit KSA, KPA, dan TB Dengan Katalog Pengelolaan Ekosistem					7271.BEA	Konservasi Kawasan/Rahmatulilal Ekosistem (Basis Line) 17.51 KOTA MANADO	32	118,715,000		118,715,000
04.03	Luas ekosistem terintegrasi yang dipulihkan						Indikator KRO				
04.04	Jumlah Individu Penyelamatan TSL (Tumbuhan dan Satwa Liar)					03	Facilitas Pengembangan Pengelolaan Areal Preservasi	32	118,715,000		118,715,000
04.05	Jumlah Spesies yang terancam punah secara nasional status terancamnya berdasarkan IUCN redlist						Indikator RO				
07	Luas KSA, KPA, TB dan Areal Preservasi					01	Luas areal preservasi yang dikelola pengelolaan				
07.01	Meningkatkan nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah					7272	Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati		175,516,000		175,516,000
07.02	Indikator Kinerja Program:						Indikator Kinerja Kegiatan:				
08	Nilai ekspor tumbuhan, satwa liar, dan bioprospecting					01	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantauan,				
08.03	Meningkatkan pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan					02	Jumlah kerjasama pengelolaan fungsi dan pembangunan				
08.04	Indikator Kinerja Program:					7272.FEC	Kerjasama (Basis Line) 17.51 KOTA MANADO	1.00	62,390,000		62,390,000
12	Nilai PNBP dan Pengelolaan Jasa Lingkungan						Indikator KRO				
12.03	Nilai PNBP dari pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar					01	Optimalisasi tata kelola terpadu pengelolaan fungsi dan pembangunan strategi di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	1.00	62,390,000		62,390,000
12.04	Peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok kerukut hutan						Indikator RO				
728	Indikator Kinerja Program:					01	Jumlah dokumen tata kelola kerjasama				
728.01	Nilai transaksi ekonomi kelompok pembudidayaan masyarakat kawasan konservasi					7272.0MA	Data dan Informasi Publik (Basis Line) 17.51 KOTA MANADO	1.00	113,310,000		113,310,000
728.02	Konservasi Spesies dan Genetik		240,000,000		240,000,000		Indikator KRO				
01	Indikator Kinerja Kegiatan:					01	Pengamatan Perencanaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	1.00	113,310,000		113,310,000
01	Jumlah persediaan tumbuhan dan satwa liar					01	Jumlah kawasan yang terancam kepunahan				
01	Jumlah data dan informasi keanekaragaman spesies					7273	Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru		2,162,481,000		2,162,481,000
01	Jumlah wilayah pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar						Indikator Kinerja Kegiatan:				
02	Jumlah komoditi bioprospek pada tahap komersialisasi					01	Penurunan Rata-rata nilai kebakaran di KSA, KPA, dan TB				
7289.0MA	Data dan Informasi Publik (Basis Line) 17.51 KOTA MANADO	1.00	90,000,000		90,000,000	02	Jumlah Unit Kawasan Suaka Alam (KSA), dan Kawasan				
001	Pengamatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati	1.00	90,000,000		90,000,000	03	Luas Usaha dan/atau Kegiatan Terbatas di KSA, KPA, dan				
001	Indikator RO					04	Peningkatan Jumlah Petak Perlindungan dan				
01	Jumlah Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati					01	Jumlah masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan				
7289.0EB	Konservasi Jenis/Spesies (Basis Line) 17.51 KOTA MANADO	5.00	150,000,000		150,000,000	02	Jumlah Kelompok Masyarakat yang dilibatkan				
001	Indikator KRO					7273.0EC	Facilitas dan Pembinaan Masyarakat (Basis Line) 17.51 KOTA MANADO	5.00	5,710,000		5,710,000
01	Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	5.00	150,000,000		150,000,000		Indikator RO				
001	Indikator RO					01	Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati	5.00	5,710,000		5,710,000
7271	Konservasi Ekosistem dan Peningkatan Areal Preservasi		118,715,000		118,715,000	01	Jumlah Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi				
	Indikator Kinerja Kegiatan:					7273.0ED	Facilitas dan Pembinaan Masyarakat (Basis Line) 17.51 KOTA MANADO	3.00	44,520,000		44,520,000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025						RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025					
KEMENLEMB : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN UNIT ORG : (04) DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM SATUAN KERJA : (693632) BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN PROPOSISI : (17) SULAWESI UTARA LOKASI : (51) KOTA MANADO						KEMENLEMB : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN UNIT ORG : (04) DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM SATUAN KERJA : (693632) BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN PROPOSISI : (17) SULAWESI UTARA LOKASI : (51) KOTA MANADO					
Halaman : 3						Halaman : 4					
KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISITATIF BARU	JUMLAH	KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISITATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
143.04.WA	Program Dukungan Manajemen		7,433,527,000		7,433,527,000		Sasaran Program:				
01	Pembinaan dan Pembinaan Kelompok Masyarakat					01	Meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, etnik, dan efisien				
01	Jumlah kelompok masyarakat yang dilibatkan					7315	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem		7,433,527,000		7,433,527,000
7273.BEA	Konservasi Kawasan/Rahmatulilal Ekosistem (Basis Line) 17.51 KOTA MANADO	21,792.00	2,112,231,000		2,112,231,000		Indikator Kinerja Kegiatan:				
002	Peningkatan Perlindungan dan Pengawasan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	21,792.00	2,112,231,000		2,112,231,000	01	Nilai SAKSP pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem				
01	Jumlah Petak Perlindungan dan Pengawasan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)					7315.EBA	Level Mutu SPP Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	2.00	7,433,527,000		7,433,527,000
01	Jumlah Petak Perlindungan dan Pengawasan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)						Indikator KRO				
01	Jumlah Petak Perlindungan dan Pengawasan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)					002	Layanan Umum	1.00	225,000,000		225,000,000
01	Jumlah Petak Perlindungan dan Pengawasan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)						Indikator RO				
01	Jumlah Petak Perlindungan dan Pengawasan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)					01	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.00	7,398,527,000		7,398,527,000
01	Jumlah Petak Perlindungan dan Pengawasan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)					004	Layanan Parkir				
01	Jumlah Petak Perlindungan dan Pengawasan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)						Indikator RO				
01	Jumlah Petak Perlindungan dan Pengawasan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)					01	Jumlah layanan operasional pemukiman				

MANADO, 29 April 2025

FAAT BUDIANTO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 143.04.2.693632/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DB 9072-7239-9554-6235

Kementerian Negara/Lembaga : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode Nama Satker : (693632) BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENYARFAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693632	BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN	5.559.000	4.550.313	21.000	-	-	10.130.313		
143.04.PP	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	-	2.096.886	-	-	-	2.096.886		
7269	Konservasi Spesies dan Genetik	-	240.000	-	-	-	240.000		
7269.QMA	Data dan Informasi Publik (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	90.000	-	-	-	90.000	17.51	
04 PNPB		-	90.000	-	-	-	90.000	049	
7269.REB	Konservasi Jenis/Spesies (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	150.000	-	-	-	150.000	17.51	
04 PNPB		-	150.000	-	-	-	150.000	049	
7271	Konservasi Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi	-	118.715	-	-	-	118.715		
7271.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	118.715	-	-	-	118.715	17.51	
04 PNPB		-	118.715	-	-	-	118.715	049	
7272	Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	-	175.510	-	-	-	175.510		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 143.04.2.693632/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DB 9072-7239-9554-6230

Kementerian Negara/Lembaga : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode Nama Satker : (693632) BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENYARFAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7272.PEC	Kerja sama (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	62.200	-	-	-	62.200	17.51	
04 PNPB		-	62.200	-	-	-	62.200	049	
7272.QMA	Data dan Informasi Publik (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	113.310	-	-	-	113.310	17.51	
04 PNPB		-	113.310	-	-	-	113.310	049	
7273	Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Bumi	-	2.162.481	-	-	-	2.162.481		
7273.QDC	Facilitasi dan Pembinaan Masyarakat (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	5.710	-	-	-	5.710	17.51	
04 PNPB		-	5.710	-	-	-	5.710	049	
7273.QDD	Facilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	44.520	-	-	-	44.520	17.51	
04 PNPB		-	44.520	-	-	-	44.520	049	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 143.04.2.693632/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DB 9072-7239-9554-6230

Kementerian Negara/Lembaga : (143) KEMENTERIAN KEHUTANAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode Nama Satker : (693632) BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENYARFAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7273.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	2.112.231	-	-	-	2.112.231	17.51	
01 RM		-	749.150	-	-	-	749.150	049	
04 PNPB		-	1.363.081	-	-	-	1.363.081	049	
143.04.WA	Program Dukungan Manajemen	5.559.000	1.853.527	21.000	-	-	7.433.527		
7315	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Biosphere Alam dan Ekosistem	5.559.000	1.853.527	21.000	-	-	7.433.527		
7315.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	5.559.000	1.853.527	21.000	-	-	7.433.527	17.51	
01 RM		5.559.000	1.853.527	21.000	-	-	7.433.527	049	
Jumlah		5.559.000	4.550.313	21.000	-	-	10.130.313		

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Kehutanan

td.
Raja Juli Antoni, Ph.D

Lampiran 6: Lembar Konsultasi pembimbingan dan Surat Keterangan Cek Turnitin

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI			
Judul : Analisis Penerapan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Pengelolaan Apbn Pada Balai Taman Nasional Bunaken Nama Mahasiswa : Vlenka Moistisa Adas / NIM. 21 043 103 Nama Pembimbing : Susy A. Marentek, SE, MSA			
No.	Tgl.	Uraian	Tanda tangan
1	12 Juni 2025	Review Bab I Latar Belakang dan mengapa untuk	
2	12 Juni 2025	Review Bab II Yang bertanggung jawab dengan kerangka kerja	
3	12 Juni 2025	Review Bab III Metode Penelitian dan bagaimana proses penelitian	
4	12 Juni 2025	Review Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan	
5	12 Juni 2025	Review Bab V Kesimpulan dan saran	
6	12 Juni 2025	Review Bab VI Daftar Pustaka	
7	12 Juni 2025	Review Bab VII Lampiran	
8	12 Juni 2025	Review Bab VIII Daftar Pustaka	
9	12 Juni 2025	Review Bab IX Daftar Pustaka	
10	12 Juni 2025	Review Bab X Daftar Pustaka	
11	12 Juni 2025	Review Bab XI Daftar Pustaka	
12	12 Juni 2025	Review Bab XII Daftar Pustaka	
13	12 Juni 2025	Review Bab XIII Daftar Pustaka	



Divalidasi oleh:
Kaprosi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan,
Prof. Dr. Hedy D. Rumboko, SE, MM, Ak, CA, CERS
NIP. 197003051998022002



Divalidasi oleh:
Kaprosi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan,
Prof. Dr. Hedy D. Rumboko, SE, MM, Ak, CA, CERS
NIP. 197003051998022002



Divalidasi oleh:
Kaprosi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan,
Prof. Dr. Hedy D. Rumboko, SE, MM, Ak, CA, CERS
NIP. 197003051998022002



Divalidasi oleh:
Kaprosi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan,
Prof. Dr. Hedy D. Rumboko, SE, MM, Ak, CA, CERS
NIP. 197003051998022002



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Politeknik Negeri Manado
Jurusan Akuntansi
Jl. Raya Politeknik, Buha, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara

Surat Keterangan Cek Turnitin Skripsi/TA Mahasiswa
 NO. 065/AK/PL/2025

Sehubungan dengan persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi, menerangkan bahwa nama berikut adalah mahasiswa yang telah diuji plagiarisme Skripsi/Tugas Akhir melalui fasilitas *software* "Turnitin".

Nama	: Vlenka Moistisa Adas
NIM	: 21043103
Program Studi	: Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi/TA	: Analisis Penerapan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Pengelolaan APBN Pada Balai Taman Nasional Bunaken
Pembimbing Utama	: Susy A. Marentek, S.E., MSA
Persentase	: 16%
Tanggal Pengecekan	: 18 Juli 2025

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Manado, 18 Juli 2025
Operator Cek Plagiasi



Dominikus Andreo Maryadi, M.Ak
NIP. 199609102024061001

**Catatan: lampirkan hasil cek plagiat*

Kegiatan Bersih Pantai Bersama Keluarga besar Balai Taman Nasional Bunaken



Struktur kepegawaian Balai Taman Nasional Bunaken



Lembar Asistensi Revisi Skripsi

1. Ketua Penguji

 POLITEKNIK NEGERI MANADO 					
FORMULIR	FM-098 ed.A rev.1	ISSUE: A	Issued: 08-08-2011	UPDATE: 1	Updated: 30-05-2012

LEMBAR ASISTENSI REVISI SKRIPSI

Nama : Vlenka Moistisa Adas
Jurusan : Akuntansi
NIM : 21043103
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
Judul : Analisis Efektivitas Penerapan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Pengelolaan APBN Pada Balai Taman Nasional Bunaken
Ketua Penguji : Stevie Kaligis, SE.,MM.,Ak

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1.	30 Juli 2025	Sudah diperbaiki Hal 7-9 sesuai dengan yang dikoreksi	
2.	30 Juli 2025	Sudah diperbaiki Hal 10-13 sesuai yang di lembar koreksi	
3	5 Agustus 2025	Kerangka berpikir sesuai dampak Penerapan	
4	5 Agustus 2025	Isi dan metodologi sudah sesuai	
5	5 Agustus 2025	Uji hipotesis Anggaran sudah sesuai menurut teori	

Manado, Juli 2025
Ketua Penguji,



Stevie Kaligis, SE.,MM.,Ak
NIP. 197204152002121000

FM-84 ed. A rev. 1

2. Penguji 1

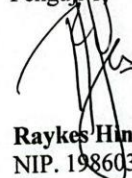
 POLITEKNIK NEGERI MANADO 					
FORMULIR	FM-098 ed.A rev.1	ISSUE: A	Issued: 08-08-2011	UPDATE: 1	Updated: 30-05-2012

LEMBAR ASISTENSI REVISI SKRIPSI

Nama : Vlenka Moistisa Adas
Jurusan : Akuntansi
NIM : 21043103
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
Judul : Analisis Efektivitas Penerapan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Pengelolaan APBN Pada Balai Taman Nasional Bunaken
Anggota Penguji 1 : Raykes H. Tuerah, SE.,MSA

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1.	31 Juli 2025	Bab I : - Permasalahan sudah sesuai - Sudah ada penelitian sebelum - Rumusan masalah sudah sesuai	
2.	31 Juli 2025	Bab II : - Judul sudah sesuai dengan teori - Pustaka sudah diterangkan - Kerangka berpikir sudah ada benang merah	
3.	31 Juli 2025	Bab IV : Hasil penelitian sudah mengjawab dengan tajam berdasarkan penelitian	
4.	31 Juli 2025	Bab V : Hasil penelitian sudah sesuai	

Manado, Juli 2025
 Penguji 1



Raykes H. Tuerah, SE.,MSA
 NIP. 198603272019031014

3. Penguji 2

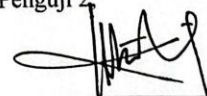
 POLITEKNIK NEGERI MANADO 					
FORMULIR	FM-098 ed.A rev.1	ISSUE: A	Issued: 08-08-2011	UPDATE: 1	Updated: 30-05-2012

LEMBAR ASISTENSI REVISI SKRIPSI

Nama : Vlenka Moistisa Adas
Jurusan : Akuntansi
NIM : 21043103
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
Judul : Analisis Efektivitas Penerapan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Pengelolaan APBN Pada Balai Taman Nasional Bunaken
Anggota Penguji 2 : Drs. Johannes Kristoffel Santie, M.AP

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1	06 Agustus 2025	Kata-kata pada Orisinalitas sudah diganti	
2	06 Agustus 2025	Kata-kata yang salah sudah dikoreksi sesuai yang ada dilembar koreksi	
3	06 Agustus 2025	Penomoran sudah tepat	
4	06 Agustus 2025	dan sudah sesuai dengan yang dikoreksi	

Manado, Juli 2025
 Penguji 2



Drs. Johannes Kristoffel Santie, M.AP
 NIP. 196610121997021001